

## BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum

#### 4.1.1 Wilayah Perbatasan dan Kondisi Keamanan di Mindanau dan Filipina Selatan

Salah satu pusran utama berbagai ancaman keamanan yang terjadi pada Filipina terletak pada wilayah Filipina Selatan yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pada wilayah Filipina Selatan berbagai masalah keamanan banyak terjadi terutama pada kota Marawi, oleh karena itu pembahasan pada gambaran umum akan menjelaskan kota Marawi dan juga daerah otonomi Mindanau.



**GAMBAR 4. 1 POSISI WILAYAH MARAWI**

(sumber : Diolah peneliti)

Marawi atau Kota Islam Marawi, merupakan sebuah kota yang terletak pada Provinsi Lanao del Sur di Pulau Mindanau di bagian selatan Filipina, dan menjadi bagian dari Otonomi Wilayah Muslim Mindanau. Kota ini memiliki populasi sekitar 201 ribu orang pada tahun 2015. Penduduk kota Marawi disebut Maranaos, dan mereka merupakan bagian kecil dari kelompok etnis Moro, arti Maranaois adalah masyarakat danau dan maskudnya karena

mereka hidup dan bekerja pada sekitar danau Lanao selama berabad-abad, Maranaos sendiri merupakan masyarakat mayoritas pada provinsi Lanao del Sur (Lanao Del Sur History, n.d).

Islam merupakan agama yang mendominasi wilayah Marawi semenjak Islam masuk ke penduduk lokal pada abad ke 14, pada 2015 populasi muslim mencapai 92,4% dari keseluruhan. Semenjak April 1980, kota ini dideklarasikan sebagai Kota Islam Marawi melalui resolusi dewan kota. Secara geografis, Marawi berada pada ketinggian 700 meter diatas permukaan laut. Wilayahnya yang cukup tinggi membuat kota ini memiliki iklim yang sejuk. Beberapa titik menarik pada kota seperti danau Lanao, kediaman kerajaan Maranao, pelatihan golf Kalilang, kampus Universitas Negeri Mindanao, dan Masjid King Faisal (Rey, 2017).

Konflik pada Marawi yang termasuk kedalam Mindanao tidak dapat dipisahkan pada pemberontakan kelompok Moro yang menginginkan kedaulatannya akan wilayah Mindanao termasuk pula peperangan yang pernah berlangsung selama empat dekade antara mereka dengan pemerintah Filipina. Kerawanan wilayah otonomi Mindanao disebabkan dari beberapa hal seperti permusuhan antar klan, perdagangan barang-barang terlarang, ketegangan antar kelompok, dan lemahnya peran negara (Strachan, 2015: 4).

Permusuhan antar klan hingga banyaknya kelompok bersenjata yang timbul merupakan penyebab utama pada ketidakstabilan wilayah mindanao, bahkan merekalah yang menjadi aktor utama dalam konflik yang terjadi. Beberapa aktor yang berperan dalam konflik yaitu Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front, Abu Sayyaf Group, Jamaah Islamiyah, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, dan Maute Group, Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Ada lagi kelompok-kelompok kecil lainnya yang juga turut berperan dalam konflik seperti Rajah Solaiman Islamic Movement, Jamaal al-Tawhid Wal Jihad, dan juga pasukan bersenjata yang berada dibawah beberapa klan.

Suburnya kelompok milisi juga biasanya dipengaruhi faktor lemahnya pemerintahan pada wilayah tersebut. Lemahnya penegakan hukum dan pemerintah berdampak pada adanya aktifitas ekonomi yang tidak sehat seperti perdagangan senjata. Lemahnya aparat negara terutama agen penegak hukum juga akan menguntungkan posisi kelompok milisi akan penguasaannya terhadap suatu wilayah. Selain itu fasilitas seperti akses kesehatan, pendaftaran data sipil, akses sistem peradilan dan pendidikan di wilayah tersebut juga belum cukup. Dampaknya terjadi marginalisasi penduduk, tidak adanya kesejahteraan sosial, ketidakmampuan untuk melakukan klaim, tidak adanya identitas, dan masyarakat yang rapuh (OCHA, 2013: 42).

Semenjak Mei 2017, Kekerasan di Marawi membuat Presiden Rodrigo Duterte mengeluarkan hukum perang (*martial law*) di Mindanao, yang menurutnya wilayah terpadat bagi pertumbuhan ancaman militan terkait dengan kelompok teroris IS (Rey, 2017). Semenjak diberlakukannya hukum tersebut, dilakukan evakuasi besar-besaran hingga mencapai 80 persen dari 200 ribu penduduk dievakuasi ke kota sekitar.

#### **4.1.2 Kelompok Teroris di Marawi dan Mindanao**

Marawi yang berada dalam wilayah otonomi kepulauan Mindanao merupakan wilayah yang memiliki beragam kelompok beraliran radikal yang juga memiliki semangat militansi yang kuat, ragam ideologi merekapun bermacam-macam yang dari ideologi etno-politis hingga kelompok yang memiliki tujuan religius radikal. Beberapa kelompok yang melakukan serangan terbuka terhadap kota Marawi umumnya tergabung dalam persatuan dibawah bendera IS.

##### **a. Islamic State di Marawi dan Mindanao**

Meningkatnya popularitas IS akan keberhasilan aksi terror internasional mereka meningkatkan pula daya tarik mereka bagi kelompok-kelompok teroris serupa lainnya, berbagai kelompok teroris dari berbagai negara kemudian ada yang mengubah aliansinya dari al-Qaeda menjadi IS, adapula yang melakukan

pemisahan dari kelompok asalnya untuk membentuk kelompok sendiri yang pro kepada IS. IS menjadi diminati pula semenjak al-Qaeda kehilangan figur pemimpin mereka dan ketika IS menunjukkan kemampuannya dalam menguasai wilayah negara dan membentuk sistem pemerintahan yang mereka klaim sebagai kekhalifahan (Sanderson, 2017:5).



#### **GAMBAR 4.2 KELOMPOK MILITAN YANG MENDUKUNG ISIS**

(sumber : The Maute Group. <https://www.rappler.com/thought-leaders/173037-maute-group-rise-family-terrorism>)

Ide-ide untuk pemberontakan di Filipina mengalami perkembangan semenjak adanya IS. Sebelumnya komunitas pemberontak muslim Filipina menganut ideologi etno-politis atau ideologi sayap kiri yang kemudian gagal mewujudkan tujuan pemberontakannya dan menghadapi tantangan dalam perkembangan masyarakat muslim, setelah itu masuknya Ideologi IS menjadi diminati karena mengajarkan kekerasan berlandaskan tujuan politik religius. Untuk mendapatkan dukungan muslim dan meningkatkan legitimasi atas aksi

militer mereka di Marawi, IS menjelaskan bahwa mereka ingin menguasai Marawi karena bertujuan membuat tempat itu Islami, dan menyatakan bahwa Marawi merupakan tempat para pendosa dengan alkohol, perjudian, dan prostitusi, serta adanya gereja dan masjid Shi'ite. IS juga menjelaskan bahwa menyatakan serangan tersebut sebagai ekspansi IS di Asia Timur. Propaganda IS juga dilakukan dengan melabelkan tentara pemerintah sebagai *crusaders*, mereka juga memberikan framing peperangan antara baik dan buruk, islam dan kafir (Gunaratna, 2017: 5).

IS di Filipina dimulai dari Isnlon Hapilon yang juga merupakan seorang pemimpin kelompok Abu Sayyaf Grup (ASG). Kurang dari sebulan setelah al-Baghdadi memproklaimkan IS pada 29 Juni 2014, sebuah video menunjukkan Isnlon Hapilon memimpin 30 pasukannya untuk melakukan kesetiaan aliansi (*bai'ah*) kepada kekhalifahan al-Baghdadi (IPAC Report, 2016:6).

Pada 2015, Isnlon berusaha membuat semacam negara Islam dalam lingkup kecil sebagai bagian dari provinsi Basilan, pada saat itu, masyarakat hanya diperbolehkan untuk pergi ke ladang mereka jika mereka telah menyatakan sumpah setianya, jika menolak maka ladang mereka akan dihancurkan, perampasan lahan juga dilakukan dengan dasar "properti milik tuhan". Lalu pada 4 Januari 2016, forum jihad, Shukukh al-Islam merilis video yang menunjukkan unifikasi empat kelompok pro-IS Filipina dibawah kepemimpinan Isnlon. Kelompok yang tergabung termasuk ASG, Ansarul Khilafah dibawah Komander Tokboy alias Abu Sharifa, Ansar al-Shariah Battalion dibawah kepemimpinan Abu Anas yang merupakan warga Negara Malaysia. Pada Juni, video lain dari IS juga dirilis, video tersebut menunjukkan warga negara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Suriah mendeklarasikan kesetiaan mereka terhadap Isnlon sebagai *amir* (pemimpin) di Asia Tenggara (IPAC Report, 2016:12).

Semenjak awal 2017 badan Intelijen Filipina sudah menyadari bahwa Provinsi Lanao del Sur merupakan pusat IS di Filipina. Penyelidikan badan

Intelijen menyatakan bahwa pada provinsi tersebut terdapat sekitar 21 kelompok Filipina sepaham dengan IS yang menyatakan kesetiaannya pada Abu Bakr al-Baghdadi, pemimpin IS di Iraq dan Suriah. Sedangkan untuk daerah Marawi, Intelijen pemerintah Filipina melacak pergerakan Hapilon yang bersamaan dengan Otto Maute sebagai seseorang yang dipercaya untuk memimpin pergerakan IS Lanao del Sur (Gunaratna, 2017: 5). Diantara berbagai kelompok pro-IS, kelompok ASG dan Maute Group (MG) merupakan dua kelompok yang paling menonjol dalam kasus penyerangan kota Marawi dikarenakan kapasitas serangannya dan relasinya yang luas.

#### **b. Abu Sayaf Group (ASG)**

ASG adalah kelompok organisasi Jihad Radikal yang didirikan tahun 1991 oleh Abdurajak Janjalani sebagai pecahan dari Moro National Liberation Front (MNLF). Tujuan utama ASG adalah untuk membentuk negara Islam di Mindanao di Filipina Selatan. Ikatan kuat Janjalani dengan Osama bin Laden dinyatakan dengan aliansinya dengan al-Qaeda, tetapi berakhir pada 2014 ketika kelompok ASG menyatakan aliansinya dengan IS. Isnilon Hapilon, salah seorang pemimpin ASG juga menjabat sebagai Emir atau pemimpin IS di Asia Tenggara pada 2016. Oleh karena itu ASG yang berada dibawah Hapilon merupakan bagian dari IS di wilayah Asia Tenggara (Sanderson, 2017: 6). Kepemimpinannya diakui oleh IS setelah media pemberitaan A'maaq yang berada dibawah IS mengeluarkan video pernyataan sumpah Isnilon (Singh, 2016: 1).

ASG memiliki relasi yang luas dengan kelompok terror asing lainnya, contohnya seperti kelompok Jemaah Islamiyah (JI) dari Indonesia, dan afiliasinya di Malaysia, Kumpulan Mujahidin Malaysia. Mereka juga membangun relasi dengan kelompok militan Muslim Mualaf atau Rajah Solaiman Movement yang berada di bagian utara Filipina (IPAC Report, 2016: 33).

Laporan oleh Congressional Research Service menyatakan bahwa hampir seluruh pemimpin ASG terbunuh atau tertangkap saat operasi

gabungan militer US dan Filipina pada tahun 2014, meskipun begitu kelompok ini masih memiliki potensi ancaman yang kuat dari tindakan terorisme, kapasitas pasukan tempur dan aktivitas kriminalnya (Strachan, 2015: 11).

Institute for Policy Analysis of Conflict pada laporannya menulis bahwa ASG rumit dijelaskan karena memiliki beragam faksi meski sama-sama berada di Mindanao, ASG yang berada di bagian Basilan dianggap merupakan ASG yang loyal terhadap IS, sedangkan sebagian lagi yang masih berada di daerah Jolo bukan merupakan IS. Meskipun begitu pemimpin mereka, Hapilon, tetap mengetuai keduanya dan batas-batas antar faksi bersifat dinamis. Kelompok ASG yang melakukan penculikan terhadap sandera juga diperkirakan merupakan ASG yang berasal dari koordinasi faksi Jolo yang merupakan bukan aliansi IS. Mereka diperkirakan memiliki aliansi yang longgar dengan Radullon Sahiron dibandingkan dengan Isnilon. Penggunaan atribut IS oleh mereka digunakan untuk menarik perhatian dan meningkatkan biaya tebusan (IPAC Report, 2016: 33).

### **c. Maute Group (MG)**

MG merupakan salah satu kelompok yang paling berpengaruh dalam aksi penyerangan di Provinsi Lanao del Sur. MG merupakan salah satu kelompok yang menyatakan aliansinya kepada IS dibawah kepemimpinan al-Baghdadi, merekapun disebut juga sebagai IS-Ranao. Pembentukan MG dimulai pada tahun 2012 oleh dua orang saudara Omarkhayam dan Abdullah, bersama-sama membentuk organisasi politik religius dan semenjak itu juga merekalah yang menjadi ketua MG, dalam pembentukannya mereka dibantu pula oleh orangtua mereka (Sanderson, 2017: 6). Secara organisasi, Abdullah maute bertindak sebagai *vice chairman* untuk operasi militer, Omarkhayam Maute menjadi *vice chairman* untuk hubungan politik, Mohammad Khayam Maute sebagai kepala operasi dan intelijen, Cayamora Maute dan Farhana Maute yang merupakan ayah dan ibu dari keluarga Maute bertanggung jawab dalam pendanaan dan logistik (Banlaoi, 2017).

Ketua Maute bersaudara memiliki latar belakang pendidikan dari Timur Tengah dan mendapatkan pengaruh radikalisme pada saat mereka belajar disana. MG terinspirasi oleh kelompok ekstrimis di wilayah mereka, termasuk Jemaah Islamiyah Indonesia dan Khilafah Islamiyah Mindanao. Melalui pernikahan, Maute bersaudara mendapatkan hubungan dengan pemuka agama konservatif di Indonesia. Kelompok ini memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam yang merdeka di Mindanao (Sanderson, 2017: 6).

Bentuk teroris berdasarkan kekeluargaan menjadi kelebihan bagi kelompok MG, bentuk tersebut meminimalkan terjadinya pengkhianatan, memudahkan dalam rekrutmen, dan dapat membentuk ikatan organisasi yang kuat. MG merupakan contoh dari satu keluarga yang seluruh anggotanya terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal seperti pemilikan senjata api ilegal, pembuatan bahan peledak ilegal, penculikan, pemerasan, pencucian uang, penyelundupan obat terlarang, dan lainnya.

Untuk mendukung aktivitasnya dalam hal militansi, MG membentuk dua kelompok bersenjata terlatih dengan nama *Khilafah sa Jabal Uhod* (Tentara kekhalifahan di Mulut Uhod), dan *Khalifah sa Ranao* (Tentara Khalifah di Lanao), dikepalai oleh Omarkayam dan Abdullah Maute. MG juga membentuk benteng persembunyiannya di kota Butig, Lanao del Sur, Lumbatan, Lambuyanague, Maragong, Masiu dan juga Marawi. Di daerah Butig, MG mampu membuat perkemahan militer dengan fasilitas untuk kombatan, bomber, *community organizers*, dan pemuka agama. Di daerah Butig tersebut juga keluarga Maute melakukan rekrutmen sekitar 300 petarung ISIS yang kebanyakan dari mereka memiliki asosiasi dengan Moro Islamic Liberation Front (Banlaoi, 2017).

Dibandingkan dengan kelompok pro-IS lainnya, MG merupakan kelompok yang memiliki anggota paling pintar, terdidik dan paling canggih di Filipina, hal ini dikarenakan mereka memiliki markas di Universitas Negeri

Mindanao di kota Marawi, disana mereka mampu menarik mahasiswa dan dosen untuk menjadi anggotanya (IPAC Report, 2016: 14).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rappler, media nasional Filipina, kelompok Maute mulai menunjukkan aksi radikalnya pada tahun 2012, mereka diyakini berasal dari anggota kelompok yang melakukan penyerangan terhadap warga sipi, hingga kemudian mampu melakukan penyerangan terhadap tentara (Fonbuena, 2017).



**GAMBAR 4.3 FOTO KELUARGA MAUTE**

(sumber : Rappler. The Maute Group. <https://www.rappler.com/thought-leaders/173037-maute-group-rise-family-terrorism>)

Dengan tujuan mempersiapkan serangan terhadap Marawi, kelompok maute membentuk tempat persembunyian di Marawi, dalam jangka panjang mereka berharap seluruh kota Marawi akan menjadi markas bagi *Daulah Islamiya Wilayatul Mashriq* (DIWM), atau Provinsi Islamic State di Asia Timur. DIMW merupakan organisasi yang memayungi seluruh kelompok-kelompok bersenjata di Filipina yang telah menyatakan kesetiaannya terhadap IS.

Kelompok yang tergabung dalam DIMW antara lain Bangsamoro Islamic Freedom Fighter, Abu Sayyaf Group, Anshar Khalifa Philippines, dan Khalifa Islamiyah Mindanao. Keluarga Maute memiliki peran yang penting dalam DIWM karena kekuatan militernya, kemampuan finansial, dan status politik (Banlaoi, 2017).

Mulai tahun 2015, klan Maute mulai terlibat dengan aksi saling serang dengan Militer di Butig, sehingga mereka harus berpindah ke Piagapo dan Marawi (Gunaratna, 2017: 4). Bukti kerjasama antara MG atau IS Lanao dengan Hapilon juga terjadi pada tahun 2016. Pada saat itu Hapilon membantu kelompok ISL untuk berpindah dari Basilan Kepulauan Sulu ke Butig pada tahun 2016. Kelompok Maute lalu membantu Hapilon untuk berpindah dari Butig menuju Marawi. MG sudah 4 kali mengalami gempuran dari operasi militer pada tahun 2016 saja, pada tahun itu pula mereka meniru tindakan IS dengan melakukan eksekusi tawanan Kristen yang menggunakan pakaian berwarna oranye (Gunaratna, 2017: 5).

#### **4.1.3 Serangan di Kota Marawi**

Berdasarkan pengamatan Intelijen Filipina, Abu Bakar al-Baghdadi bersama dengan kelompok IS yang berada di Filipina merencanakan untuk melakukan gempuran Marawi pada Maret-April 2017. Omarkhayam Maute, pemimpin utusan dari ISL menunjukkan video yang menunjukkan Bagdadi menginstruksikan kelompok ISL untuk melakukan serangan di kota Marawi. Dimulai dari April, petarung IS di Lanao menginfiltrasi kota Marawi dengan diam-diam, mereka membangun operasi terselubung dan jaringan pendukung. Saat serangan terjadi, para militan asing bersama kelompok Abu Sayaf memimpin peperangan, sedangkan Hapilon bersama dengan Maute bersaudara mengkoordinasikan dan menjadi komando dalam operasi.

Pada serangan pertamanya di Marawi, IS diperkirakan memiliki kekuatan yang terdiri dari 300 orang yang terdiri dari 150 militan IS Lanao (Maranos), 40 militan asing (mayoritas berasal dari Indonesia dan Malaysia),

30 militan Yakans dan Tausog dari Abu Sayyaf Group, 30 militan Balik Islams (masuk Islam), dan 30 orang Maguindanon.

Peperangan di Marawi pecah semenjak bulan Mei 2017 dan berlangsung selama sekitar 5 bulan, selama proses peperangan berlangsung diberlakukan hukum peperangan dan karenanya ratusan ribu warga penduduk kota terpaksa mengalami evakuasi massal. Gedung-gedung dan infrastruktur kota hancur akibat pertempuran. Korban jiwa muncul dari pihak teroris, warga sipil, dan tentara pemerintah (Bueza, 2017).

Pertempuran Marawi dimulai pada 23 Mei 2017, pada saat itu pertempuran terjadi antara pasukan pemerintah dengan anggota kelompok Maute di Marawi, kelompok Maute melancarkan aksi pengambil alihan suatu apotek dengan mengganti bendera nasional Filipina dengan bendera hitam simbol IS. Serangan tersebut dibawah inisiatif Isnilon Hapilon sebagai pemimpin ASG dan IS di Filipina. Pada hari itu juga presiden Duterte langsung mengeluarkan hukum peperangan untuk daerah Mindanao untuk menghadapi kemungkinan pemberontakan (Bueza, 2017).

Menindaklanjuti peperangan tersebut militer Filipina mengeluarkan perintah penangkapan yang ditujukan terutama kepada anggota kelompok Maute dan ASG untuk tindak kriminal dan pemberontakan, Presiden menawarkan hadiah khusus untuk pemimpin gerakan pemberontak. Yaitu sekitar 10 juta Peso Filipina untuk Isnilon, dan 10 juta untuk kedua ketua kelompok Maute. dalam menghadapi kondisi peperangan, departemen sosial di Marawi mulai melakukan evakuasi penduduk ke daerah sekitar, evakuasi dilakukan bertahap dan dalam prosesnya pemerintah juga berupaya menggapai beberapa warga sipil yang terjebak dalam peperangan ataupun yang menjadi tawanan perang (CNN Philippines Staff, 2017).

Kelompok Moro National Liberation Front (MNLF) yang pada saat itu telah menjalin kedekatan dengan pemerintah juga turut terlibat membantu tentara pemerintah untuk menumpas Maute dengan melakukan pengerahan

pasukan di sekitar Marawi, mereka juga membantu proses evakuasi penduduk Marawi. Selain itu bantuan juga diberikan oleh tentara kelompok komunis untuk membantu presiden Duterte. Sementara bantuan militer asing diberikan oleh Amerika Serikat dengan menyediakan bantuan teknis, kemudian bantuan dari mata-mata militer Australia dengan menyediakan pesawat mata-mata diatas langit Mindanao, Cina juga memberi dukungan dengan mendonasikan rifles dan amunisi kepada militer Filipina (Bueza, 2017).

Rencana awal pemberlakuan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang harusnya berakhir pada 22 Juli 2017 kemudian diperpanjang hingga 1 Oktober, lalu diperpanjang lagi hingga akhir Oktober 2017 karena pertimbangan dari dewan perwakilan dan komandan militer. Untuk membayar kerugian pada keluarga tentara yang meninggal, Duterte menyatakan bahwa dia membutuhkan sekitar 50 Juta Peso atau sekitar 13 Miliar Rupiah (CNN Philippines Staff, 2017).

Dalam peperangan tersebut, pasukan pemerintah menyatakan bahwa mereka telah berhasil membunuh Isnilon Hapilon, Hapilon Maute, dan Omar Maute, ketiga tokoh tersebut merupakan tokoh penting peperangan kelompok teroris di Marawi. Pengungkapan juga dilakukan kepada kedua orang tua dan saudari dari Maute bersaudara. Setelah pemimpin kelompok militan berhasil dikalahkan pada 16 Oktober, sehari setelahnya Presiden Duterte menyatakan bahwa Marawi telah dibebaskan. Secara total peperangan berlangsung selama 148 hari atau 5 bulan, jumlah korban tewas mencapai 163 orang dari tentara dan polisi pemerintah, 47 orang warga sipil, dan 847 milisi Maute. Sedangkan jumlah evakuasi keseluruhan mencapai 359,680 jiwa. Setelah peperangan selesai total 288 tentara pemerintah yang selamat meninggalkan marawi untuk kembali ke tempat asal mereka (CNN Philippines, 2017).

#### **4.1.4 Potensi pengaruh krisis di Filipina bagi Indonesia**

Krisis yang disebabkan oleh terorisme di Filipina tentunya tidak hanya menjadi masalah bagi satu negara, kemudahan transportasi dan komunikasi

menjadi tantangan pula bagi negara-negara di sekitar Filipina, Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Filipina mendapatkan potensi ancaman terhadap menguatnya aktivitas terorisme di Filipina Selatan.

Jika dilihat dari posisi geografisnya, Indonesia dan Filipina merupakan negara yang berbatasan secara langsung di lautan, jarak antara pulau terdekat dari kedua negara bahkan dapat ditempuh hanya dengan beberapa jam melewati wilayah air dan darat Malaysia (Tempo.co, 201). Luasnya perbatasan laut antara dua negara dan banyaknya pulau-pulau kecil tidak berpenghuni di sekitar perbatasan menjadi tantangan bagi pengawasan wilayah perbatasan tersebut. Terlebih lagi pusat dari aktivitas teroris di Filipina tumbuh sangat subur di wilayah Filipina Selatan yang terletak di perbatasan dengan Indonesia (Ikanubun, 2017).



**GAMBAR 4.4 BATAS WILAYAH FILIPINA DENGAN INDONESIA**

(Sumber: Batas Negeri. Peta Miangas. <http://www.batasnegeri.com/wp-content/uploads/2015/03/1-peta-Miangas.jpg>)

Wilayah perbatasan yang tidak mendapatkan pengawasan kuat sangat berpotensi untuk menjadi daerah transportasi bagi beragam aktivitas ilegal

seperti penyelundupan obat-obat terlarang, senjata, hingga anggota teroris yang ingin menyebarkan pahamnya di tempat lain, ataupun bergabung dengan milisi di negara lain.

Kalahnya kelompok IS yang berada di Filipina Selatan menimbulkan spekulasi bahwa kelompok-kelompok teroris yang terpukul mundur dan masih berkeliaran bebas akan pindah dari Filipina Selatan dan mencari tempat baru untuk dijadikan markas dan perlindungan, dalam hal ini Indonesia merupakan negara yang paling potensial karena letaknya yang dekat, dan juga memiliki kedekatan hubungan dengan beberapa kelompok teroris Filipina.

Contoh nyata aktivitas ilegal di wilayah perbatasan yang terjadi adalah Pulau Sebatik di perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang seringkali menjadi jalur ilegal bagi warga Indonesia yang akan bergabung dengan kelompok militer bersenjata di Filipina Selatan. Jalur ini menjadi jalur favorit para milisi semenjak tahun 1990-an, beberapa kelompok milisi yang melakukan perlintasan wilayah ini adalah MILF, Jamaah Islamiyah, Maute, Jamaah Ansharud Daulah (BBC Indonesia, 2017).

Besarnya potensi ancaman juga dipengaruhi dari kondisi demografi di Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Islam di Indonesiapun memiliki berbagai macam aliran yang sangat beragam. Kesamaan latar belakang agama tentu tidak menjadi satu faktor tunggal yang menyebabkan mudahnya penyebaran ideologi agama yang beraliran radikal hingga berujung pada tindakan terorisme, tetapi pola rekrutmen yang sangat rapi dan terorganisir dari kelompok teroris juga menjadi tantangan bagi penyebaran ideologi kelompok teroris ini.

Indonesia sendiri memiliki beberapa kelompok sel teroris yang berada di dalam negeri (Sya, 2017) Sel teroris yang berasal dari Indonesia juga tentu meningkatkan potensi ancaman jika memiliki hubungan dengan teroris yang ada di Filipina, kelompok teroris yang memiliki kesamaan pandangan dan menjalin hubungan kerjasama dapat menjadi kelompok teroris yang memiliki

koordinasi baik, dan sangat mungkin akan saling membantu dalam hal pemasokan senjata, pendanaan, pelatihan, hingga pengiriman milisi.

Hubungan yang kuat antara kelompok radikal dari kedua negara menjadi kekhawatiran bagi aktivitas terorisme di Indonesia dan Filipina, Omarkhayam Maute yang merupakan pemimpin kelompok Maute, di masa lalu juga pernah melakukan penyebaran ideologi radikalnya di Bekasi, disana juga dia bertemu Istrinya (Hodge, 2017), Maute bersaudara juga sempat mendapatkan arahan tentang jaringan teroris Asia Tenggara dari seorang pemuka agama asal Indonesia (BBC Indonesia, 2017b).

Keterlibatan milisi Indonesia dalam serangan Marawi terbukti setelah kepolisian Filipina mengeluarkan daftar tujuh orang warga negara Indonesia yang menjadi buron karena menjadi anggota kelompok teroris Maute, mereka berangkat secara terpisah ke Filipina pada November 2016 hingga April 2017 (Santoso, 2017) Otoritas Malaysia juga menangkap dua WNI yang akan berangkat ke Filipina pada bulan Agustus (Christiatuti, 2017). Syahputra teroris asal Indonesia juga tertangkap oleh pemerintah Filipina pada November 2017 (Talambong, 2017). Istri dari Omarkhayam Maute sendiri juga merupakan WNI yang menjadi pendukung kelompok Maute dibawah suaminya.

Aksi penyerangan kota Marawi oleh kelompok-kelompok milisi dibawah bendera ISIS menimbulkan daya tarik yang tinggi bagi kelompok teroris ataupun Individu yang memiliki pemikiran radikal di Indonesia, aksi penyerangan terbuka sangat menantang bagi para mereka yang ingin berjihad di medan perang. Terlebih wilayah Filipina yang lebih dekat dan lebih mudah dijangkau dibandingkan harus pergi ke Suriah atau Iraq.

Salah satu ancaman nyata telah dirasakan oleh Indonesia dari dampak kuatnya aktivitas terorisme di Filipina adalah adanya penculikan. Penculikan merupakan sebagian dampak dari adanya beragam kegiatan ilegal yang dilakukan oleh kelompok milisi radikal di Filipina Selatan, telah beberapa kali kelompok Abu Sayaf dari Filipina melakukan penculikan terhadap warga

negara asing yang melintas pada wilayah perbatasan tersebut, WNI menjadi salah satunya yang paling sering.

Pada Maret 2016 terjadi penculikan 10 WNI anak buah kapal batu bara yang melintas di perairan sulu (Armandhanu, 2017). Pada bulan Desember 2016 terjadi dua kali penyanderaan terhadap empat orang WNI di perairan Sabah, sedangkan pada 9 Januari terjadi penculikan terhadap tiga WNI (BBC Indonesia, 2017c). Penculikan tersebut tentu menjadi tantangan karena penculiknya berasal dari Filipina, dan sandera akan ditahan di wilayah negara Filipina, oleh karena itu Indonesia tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyeragaman militer karena akan melanggar batas kedaulatan Filipina.

#### **4.1.5 Kerjasama Keamanan Indonesia-Filipina**

Indonesia dan Filipina merupakan negara yang mendapatkan dampak terorisme sangat kuat di kawasan, hal tersebut jika dilihat dari banyaknya kelompok teroris yang berada di wilayah kedaulatannya dan juga kekuatan yang mereka miliki. Besarnya potensi ancaman terorisme mendesak perlunya peningkatan pertahanan dan keamanan bagi negara-negara, peningkatan kapasitas pertahanan selain dilakukan secara internal dilakukan pula dengan menjalin kerjasama dengan negara lain.

Kerjasama kawasan diperlukan untuk memudahkan proses pengadilan, evakuasi tersangka, dan pemblokiran dana gerakan (Djelantik, 2016: 6). Kerjasama antar negara dalam melawan terorisme terbatas karena mempertimbangkan masalah otonomi dan kedaulatan.

Pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan kelompok teroris untuk menyebarkan pengaruhnya melewati batas-batas negara, oleh karena itu kemampuan mereka tidak hanya perlu diimbangi oleh suatu negara tetapi membutuhkan kerjasama yang terpadu antara negara-negara untuk dapat mencegah pengaruhnya.

Dalam hal kerjasama terdapat beberapa perbedaan signifikan antara negara dan kerjasama antara kelompok teroris. Kelompok-kelompok teroris modern cenderung bekerja sama dalam jaringan yang longgar dan dalam sel-sel yang saling tidak mengenal, jaringan terorisme konvensional bekerja dalam tingkatan yang berbeda-beda. Longgarnya organisasi teroris dan jangkauannya yang global mampu menarik militan asing untuk bergabung hal tersebut merupakan kelebihan lain bagi kelompok teroris, suatu organisasi teroris bisa saja mendapatkan bantuan asing secara dana, senjata ataupun militan. Sedangkan suatu negara akan kesulitan melakukan pertukaran tersebut karena terbatas pada hukum dan peraturan masing-masing negara (Djelantik, 2016: 6).

Secara historis hubungan kerjasama antara Filipina dengan Indonesia telah berlangsung semenjak 1949 dari pembentukan hubungan diplomatik antara kedua negara, hubungan kedua negara juga berlangsung pada pembentukan organisasi regional ASEAN pada 1967 yang salah satu tujuannya juga untuk menjaga stabilitas kawasan terhadap isu-isu keamanan dan pertahanan. Dalam perkembangannya kedua negara semakin meningkatkan hubungan diplomasi dan kerjasama dalam berbagai bidang termasuk pertahanan. Isu keamanan terhadap organisasi kriminal dan terorisme merupakan isu yang saat ini mendapatkan perhatian antara kedua negara karena tingginya tingkat aktivitas organisasi kriminal pada wilayah laut sulu yang mencakup wilayah batas negara Indonesia, Filipina, dan juga Malaysia.

Kerjasama pertahanan antara kedua negara diawali pada tanggal 25 Juli 1963 dalam bentuk patroli terkoordinasi (*Coordinated Patrol Operations*) pada wilayah perbatasan laut kedua negara yang kemudian ditingkatkan menjadi operasi patroli perbatasan laut kedua negara (Kemhan, 2017a:1). Kerjasama kedua negara juga ditunjukkan dalam bentuk peran aktif Indonesia

dalam membantu proses rekonsiliasi di Filipina Selatan antara organisasi MNLF dengan Pemerintah Filipina.

Salah satu daerah yang menjadi fokus kerjasama pertahanan antara kedua negara adalah wilayah perairan Sulu, wilayah tersebut merupakan perbatasan Filipina dengan Sulawesi, Indonesia dan juga Sabah, Malaysia. kawasan lautan Sulu-Sulawesi merupakan kawasan yang signifikan bagi masyarakat Filipina Selatan ataupun bagian utara Sulawesi, tetapi juga untuk navigasi internasional. Wilayah tersebut merupakan navigasi untuk tanker besar karena kedalaman lautnya yang cukup untuk wilayah perlintasan kapal tanker.



**GAMBAR 4.5 KAWASAN LAUT SULU DAN SEKITARNYA**

(Sumber: Southeast Asia's Tri-Border Area

<https://worldview.stratfor.com/article/policing-southeast-asias-tri-border-area> )

Selain alasan ekonomi, alasan keamanan menjadi pertimbangan penting dalam kerjasama internasional di wilayah Sulu. Mudahnya jangkauan wilayah Sulu dari Sabah, Sulawesi, dan Mindanao memudahkan pula pergerakan berbagai kelompok teroris seperti ASG, IS Filipina dan Moro

Islamic Liberation Front. Pada wilayah Perairan Sulu-Sulawesi tersebut berbagai kelompok teroris dari Filipina melakukan serangan terhadap kapal yang melintas dan melakukan penculikan untuk tebusan, aktivitas lain yang dilakukan di daerah tersebut juga mencakup seperti rekrutmen, koordinasi dan mobilisasi kekuatan kelompok teroris Filipina dengan kelompok teroris lain di Asia Tenggara.

Kerjasama pertahanan dalam penanggulangan terorisme di perbatasan pernah digagas oleh Amerika Serikat pada tahun 2004, kerjasama yang ditawarkan pada waktu itu adalah U.S Regional Maritime Security Initiative (RMSI). Kerjasama tersebut dalam prosesnya mendapat penolakan dari Indonesia dan Malaysia, hal tersebut karena adanya rencana untuk melakukan penempatan pasukan operasi khusus beserta kapal cepat yang memungkinkan terjadinya pelanggaran kedaulatan (US House of Representatives, 2004). Indonesia juga menolak inisiatif tersebut dengan alasan rancangan institusi yang ada dianggap terlalu militeristik dan kurangnya peran pemerintah dalam perancangan inisiatif. Inisiatif lain juga coba dimunculkan oleh US terkait kerjasama keamanan sub-regional melalui forum Multinational Interagency Maritime Security Workshop di Cebu, Filipina pada tahun 2007, inisiatif dalam kerjasama anti-terorisme tersebut juga mendapatkan penolakan. Kedaulatan diperkirakan menjadi hambatan utama dalam peningkatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Filipina di Sulu-Sulawesi (Febrica, 2014:2).

Menurut Febrica dalam *“Securing the Sulu Sea”* Pemerintah Indonesia berusaha memisahkan isu perompakan laut dan terorisme maritim sebagai isu yang tidak saling berkaitan, upaya pemisahan tersebut dimunculkan untuk menghindari tidakan internasionalisasi isu terorisme yang berpotensi memunculkan adanya intervensi asing untuk mengamankan di wilayah lautnya. Indonesia seringkali menolak kerjasama pertahanan kawasan Sulu-

Sulawesi yang melibatkan AS termasuk kesepakatan Proliferasi Security Initiatives dan Container Security Initiatives (Febrica, 2014: 5).

Di lain pihak, pemerintah Filipina sebagai sekutu pemerintah AS, memiliki pertimbangan keamanan yang berbeda. Program kebijakan AS dalam perang melawan terorisme di Asia Tenggara berjalan melalui bantuan dari Filipina, hal tersebut mencakup bantuan dana yang mencapai ratusan juta Dolar AS dan penempatan pasukan, jet tempur dan kapal AS di Filipina Selatan untuk memerangi ASG. Hal tersebut berjalan meskipun konstitusi Filipina melarang adanya kehadiran pasukan militer asing didalam negaranya (Febrica, 2014: 4).

Indonesia bersikap sangat selektif dalam mensepakati tawaran kerjasama pertahanan dalam kasus pengamanan wilayah perbatasan dengan Filipina, dalam perkembangannya Indonesia menolak berbagai kesepakatan yang diusulkan oleh pemerintah AS dengan pertimbangan menghindari adanya kekuatan asing atau dari luar regional untuk terlibat. Tetapi sebaliknya Indonesia mendukung berbagai kesepakatan yang dibentuk bersama-sama oleh negara-negara sub-regional Asia Tenggara ataupun yang berada dibawah organisasi ASEAN.

Pada 27 Agustus 1997, Menteri Pertahanan dari Indonesia dan Filipina membentuk kerjasama pertahanan, dalam kerjasama tersebut menuntut kedua pihak untuk mengadakan latihan gabungan, operasi patroli perbatasan, dan pertukaran informasi. Sedangkan pada 2007 kesepakatan tentang keamanan juga terbentuk dalam kesepakatan "Sea Linkages" antara Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Filipina, isi kesepakatan tersebut yaitu untuk membuat desain jalur perdagangan maritim dan jalur angkutan manusia; peningkatan kapasitas, prosedur dan persyaratan untuk imigrasi, karantina dan pengamanan; membentuk suatu database perdagangan maritim East Asia Growth Area. Kerjasama pertahanan Indonesia-Filipina juga dilakukan bersama dengan Malaysia, Thailand dan

Kamboja pada tahun 2002 dengan fokus area Sulu-Sulawesi. Kesepakatan menyatakan tiap-tiap pihak untuk membentuk jaringan komunikasi, pertukaran informasi, menginformasikan pengungkapan warga asing pihak lain, dan membentuk *Joint Comitte* untuk menangani masalah administratif dan tugas-tugas operasional. Kesepakatan tersebut juga mensyaratkan masing-masing pihak untuk membagikan daftar penumpang, menyediakan akses masing-masing databank, melakukan konsultasi dengan fasilitas bebas visa, membagikan data visa yang terkena *blacklist*, memperkuat kendali perbatasan melalui pembentukan jalur perlintasan, mendukung upaya pemberantasan terorisme pada legislatif, dan melakukan diplomasi publik untuk melawan propaganda teroris (Febrica, 2014: 6).

Kerjasama penganggulangan terorisme dalam lingkup regional dimunculkan oleh ASEAN semenjak tahun 2001 dalam *ASEAN Declaraton on Joint Action to Counter Terrorism* menyusul kepekaan dunia internasional terhadap ancaman terorisme. Pada pertemuan pertamanya para negar-negara sepakat untuk membentuk kerangka kerja regional untuk melawan kejahatan transasional dengan terorisme sebagai salah satu fokusnya (ASEAN, 2012). Kesepakatan tersebut bukan merupakan kesepakatan pertama yang membahas terorisme, sebelumnya sudah ada beberapa kesepakatan ASEAN yang menyiggung tentang terorisme tetapi bahasannya masih umum terhadap kejahatan transnasional seperti pada *ASEAN Declaration on the Prevention and Control of Transnational Crime* tahun 1997(ASEAN, 2007).

Kesepakatan lanjutan ASEAN dalam penanggulangan terorisme dibentuk pada tahun 2007 dalam *ASEAN Convention on Counter Terrorism*. Bidang kerjasama yang ditentukan secara umum tentang pencegahan terorisme melalui pertukaran informasi, pencegahan tindak terorisme, persebaran terorisme dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dalam membuat kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa pihak-pihak (negara) yang terlibat harus menghargai prinsip-prinsip kesetaraan berdaulat dan integritas

wilayah negara-negara serta non-interferensi dalam urusan internal pihak-pihak lain (ASEAN, 2007: 64).

Berbagai kesepakatan regional tersebut akan menguntungkan bagi seluruh lembaga negara yang terlibat termasuk Angkatan Laut, Polisi, dan Agen Imigrasi dalam hal pengawasan, pencegahan dan penindakan berbagai hal yang terkait dengan keamanan dan ketahanan nasional.

Kesepakatan terbaru tentang keamanan dimunculkan dalam kerjasama trilateral antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia pada tahun 2016. Kerjasama Trilateral dimulai dari pertemuan antara Menlu dan Panglima dari tiga negara di Yogyakarta pada 5 Mei 2016, semenjak saat itu aktif dilakukan beberapa pertemuan trilateral antara Menteri Pertahanan, Panglima militer, atau Menteri Luar Negeri. Pertemuan digelar beberapa kali pada tahun 2016 untuk membahas masalah ancaman maritim, pembajakan dan adanya kelompok radikal ASG. Melalui kesepakatan trilateral negara-negara memunculkan *Frame of Arrangement (FoA)* yang berisi standar operasi patroli maritim trilateral, dengan ditandatangani dokumen tersebut maka ketiga negara sudah dapat segera melaksanakan patroli bersama yang diharapkan dapat mengatasi masalah keamanan maritim (Kemhan, 2017b: 1).

Pada kesepakatan trilateral tersebut dimunculkan sebuah *Plan of Actions* bagi ketiga negara yang fokusnya dalam upaya penanggulangan teroris secara terpadu, Plan of Actions tersebut yaitu (Kemlu, 2017a):

- a. Meningkatkan upaya kerjasama dalam mengatasi hal-hal dasar penyebab kondisi terorisme seperti kemiskinan, obat-obatan terlarang, kriminal, dan ketimpangan sosial.
- b. Meningkatkan pertukaran informasi intelijen pada seluruh isu keamanan, potensi, ancaman.
- c. Menghentikan aliran pendanaan teroris
- d. Menghentikan penyebaran terorisme atau yang terkait melalui *cyberspace*, terutama sosial media.
- e. Mencegah dan menekan penyebaran komunikasi teroris

- f. Mencegah persebaran senjata ilegal termasuk pergerakan teroris
- g. Mempertimbangkan pembekalan militer khusus dan pelatihan pasukan penegak hukum.
- h. Mendukung Trilateral Cooperative Arrangement dan upaya-upaya regional lain dalam memberantas kejahatan trans-nasional.
- i. Memantau dan mengimplementasikan seluruh kesepakatan yang ada tentang terorisme dan ekstrimisme.
- j. Melakukan perbandingan masing-masing hukum negara terhadap terorisme untuk meningkatkan kekuatan badan legislasi.
- k. Melawan ekstrimisme melalui pendidikan, pelibatan komunitas termasuk pada pelibatan pemuka agama, mempromoskan toleransi, moderasi dan kesatuan dalam perbedaan.
- l. Menggali inisiatif untuk mendukung korban terorisme
- m. Mempromosikan deradikalisasi, rehabilitasi, dan reintegrasi.
- n. Melindungi kelompok rentan seperti wanita dan anak-anak, dari pengaruh teroris.

Melalui forum trilateral tersebut, bentuk kerjasama yang lebih partisipatif dimunculkan dalam patroli maritim terkoordinasi, oleh karena itu selanjutnya negara-negara kemudian menentukan pusat komando masing-masing untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan intelijen, juga sebagai pusat koordinasi untuk mendeteksi ancaman, dari masing-masing focal point tersebut lalu mereka membentuk jaringan komunikasi yang terkoordinasi, dan terakhir untuk merumuskan SOP dari patroli maritim yang terkoordinasi (Kemhan, 2017b: 3).

Mengenai pembentukan kerjasama Malphindo, Hastin Dumadi dari Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa kerjasama dibentuk karena ada masalah bersama dan Indonesia tidak ingin membiarkan Filipina Sendirian, kerjasama didukung juga dari adanya fakta bahwa ada milisi asing di Filipina yang berasal dari Indonesia dan Malaysia, oleh karena itu kedua negara harus

berusaha mencegah hal tersebut kedepannya (Hastin Dumadi, Komunikasi Personal, 2 November 2017).

Pada Pertemuan awal Malphindo dilibatkan menteri luar negeri, panglima TNI, kepala BIN, badan khusus penanggulangan terorisme, pada awal pembentukan Indonesia juga sudah menyediakan rencana aksi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Indonesia menyadari bahwa penanganan kasus radikalisme dan terorisme akan sangat sulit dan individu yang sudah terpengaruh paham tersebut akan sulit dipengaruhi paham lain, oleh karena itu Indonesia juga menginisiasi kerjasama jangka panjang supaya individu tersebut mampu dirubah. Dalam hal tersebut Indonesia juga memiliki pengalaman yang panjang. Oleh karena itu kerjasama Malphindo yang sudah berjalan akan tetap berlangsung dalam jangka panjang.

Mengenai mekanisme yang akan diterapkan, Menurut Hastin, bentuk kerjasama salah satunya akan berupa patroli, patroli tidak dilakukan secara beramai-ramai tetapi dilakukan patroli agar tiap anggota militer melakukan patroli di wilayahnya masing-masing secara terkoordinasi. Hal ini terkait peningkatan kewaspadaan terhadap warga Indonesia dan Filipina yang ingin bergabung untuk berperang di Filipina Selatan, ataupun menyebar dari Filipina ke Indonesia dan Malaysia.

Pada Juni 2017 patroli laut terkoordinasi dilakukan oleh ketiga negara, hal tersebut dilakukan setelah mendapatkan beberapa kali penundaan semenjak dicetuskan pada 2016. Tiga negara lalu menetapkan pusat komando maritimnya masing-masing, Indonesia menetapkan Tarakan sebagai pusat patrolinya, Filipina menetapkan Bongao, sedangkan Malaysia menetapkan Tawau. Patroli maritim dilakukan secara bergiliran antara tiga negara dengan jalur pelayarannya di masing-masing negara (Zack, 2017)

Pada bulan Oktober 2017 dilakukan patroli udara sebagai upaya mendukung kerjasama patroli trilateral permukaan laut, kegiatan patroli berlangsung dalam wilayah maritim ketiga negara yang memiliki potensi ancaman tinggi. Patroli akan dimulai di Tarakan untuk Indonesia, Bongao untuk

Filipina dan Tawau untuk Malaysia. Masing-masing negara lalu akan memimpin operasi dengan negara tuan rumah sebagai pemimpinnya dan penyedia asset, pada proses ini anggota patroli negara lain juga dilibatkan sebagai anggotanya (Mangosing, 2017). Patroli udara dilakukan dua kali setiap bulan, kepemimpinannya dimulai dari Indonesia pada bulan Oktober, kemudian disusul Malaysia, Filipina hingga kembali lagi ke Indonesia (Kemhan, 2017c: 9).

## **4.2 Analisis Data Penelitian**

### **4.2.1 Identifikasi Landasan Kerjasama Pertahanan Indonesia dengan Filipina dalam Krisis di Marawi**

Dalam melaksanakan kerjasama pertahanan dan keamanannya suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya, ada hal-hal mendasar yang akan menentukan beragam pertimbangan bagi suatu negara untuk terlibat dan membentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanannya seperti norma dan identitas. Norma dan identitas merupakan hal yang mendasar seperti ide-ide tentang bagaimana suatu negara akan melaksanakan atau mengembangkan kerjasamanya dengan bangsa atau entitas internasional lain.

Norma dan identitas tersebut kemudian mengalami pertukaran-pertukaran ketika agen-agen dalam negara bersosialisasi hingga kemudian terjadi pembakuan norma dan identitas, ketika sudah mencapai tahap integrasi institusional hal tersebut akan menjadi sebuah peraturan seperti hukum, ataupun doktrin. Proses proses seperti sosialisasi dan institusionalisasi dapat terjadi dalam level negara dan juga pada level organisasi internasional.

Norma dan identitas akan mengalami persebaran dalam level negara ataupun level internasional, hal tersebut kemudian akan dapat digunakan untuk mengembangkan kebiasaan jangka panjang suatu negara ataupun organisasi internasional dalam berinteraksi dan mengatur penyelesaian sengketa secara damai. Interaksi antar negara sama halnya seperti interaksi

antar kelompok sosial, dapat memberikan saling ketergantungan dan responsivitas, termasuk pemunculan kepentingan-kepentingan baru, dan pengakuan akan identitas bersama.

#### **4.2.1.1 Norma yang dimiliki Indonesia**

Norma Indonesia terkait masalah pertahanan-keamanan dan kerjasama internasional yang digunakan saat ini dapat ditemukan pada Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, buku ini merupakan pernyataan kebijakan pertahanan secara menyeluruh yang diterbitkan oleh Menteri dan disebarluaskan ke masyarakat umum, baik domestik maupun internasional untuk menciptakan saling percaya dan meniadakan potensi konflik. Buku ini merupakan amanat dari UU no 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, dalam buku ini berisi tentang hambaran umum kebijakan pertahanan negara, strategi pertahanan negara, dan pembangunan postur pertahanan negara. Buku ini sendiri mengacu pada beberapa peraturan pemerintah seperti UUD, UU dan Peraturan Menteri.

Untuk lebih terfokus pada topik tulisan maka dari beberapa peraturan pemerintah yang ada, pembahasan akan lebih banyak terfokus pada peraturan yang terkait pada masalah kerjasama pertahanan dan keamanan antar negara yang juga dipercaya menjadi prinsip kerjasama Indonesia dengan negara lain.

Untuk mengetahui prinsip kerjasama pertahanan Indonesia maka perlu melihat Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, pada UU tersebut disebutkan beberapa pertimbangan yang mengatur tentang hubungan luar negeri Indonesia antara lain.

1. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat melaksanakan hubungan luar negerinya berdasarkan asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

2. Berdasarkan pembukaan UUD45, tujuan Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
3. Untuk melaksanakan ketertiban dunia Indonesia melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional.
4. Pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri dalam forum apapun diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.

Secara umum penyelenggaraan politik luar negeri Indonesia dan penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk mendukung terciptanya perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan dalam hubungan internasional melalui politik luar negeri yang bebas aktif disertai prinsip untuk menjaga kemurnian sebagai gerakan nonblok. Oleh karena itu Indonesia tidak memihak kepada salah satu kekuatan pakta militer manapun dan menempuh cara-cara dialog dalam menangani masalah internasional, turut serta memelihara perdamaian dunia dan berperan aktif dalam meredakan ketegangan internasional (Kemhan, 2015: 71).

Kerjasama internasional Indonesia bidang pertahanan diselenggarakan untuk membangun sikap saling percaya antar negara dengan prinsip saling menghormati kedaulatan negara lain, tidak mencampuri urusan dalam negeri, saling menguntungkan, sekaligus sebagai instrumen dalam mencegah konflik antarnegara. Kerja sama tersebut juga bertujuan membangun kapasitas pertahanan (Kemhan, 2015: 72).

Dalam menjelaskan norma-norma kerjasama pertahanan internasional Indonesia, akan dibagi beberapa norma utama yang dianggap menjadi panduan utama bagi Indonesia dalam kerjasama pertahanan internasionalnya dengan negara-negara lain, norma tersebut yaitu Bebas Aktif, non-aliansi, dan mendukung perdamaian dunia.

### a. Bebas Aktif

Politik luar negeri bebas aktif memiliki arti politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaannya terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara pakta atau aliansi pada satu kekuatan dunia. Maksud dari kata aktif yaitu aktif dalam politik dunia untuk mengejar kepentingan nasional, kepentingan nasional Indonesia yaitu untuk mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana disebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal tersebut dilakukan dengan memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya (UU Hubungan Luar Negeri, 1999).

Berikut juga pembangunan di bidang kerjasama internasional diarahkan pada peningkatan kerja sama pertahanan secara bilateral dan multilateral mengacu pada kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Bentuk kerja sama internasional dikembangkan untuk membangun kepercayaan (*confidence building measures*), pembangunan kapasitas (*capacity building*), ikut serta mewujudkan perdamaian dunia, pendidikan dan pelatihan (Kemhan, 2015; 72).

Indonesia menyadari kerja sama internasional merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pertahanan negara. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan posisinya menjadikan pertahanan negara tidak apat hanya berdimensi nasional, melainkan juga internasional. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengembangkan kerja sama bidang pertahanan dengan negara lain dalam mendukung tercapainya kepentingan nasional di bidang pertahanan. Kerjasama pertahanan yang dilakukan Indonesia tetap berpedoman pada prinsip lain seperti tidak terlibat pada pakta pertahanan dan untuk mewujudkan perdamaian.

Keaktifan Indonesia dalam konteks regional ditunjukkan dengan terus mendorong dan memperkuat pembangunan kerjasama kawasan secara terintegrasi dengan memperkuat Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai organisasi regional yang penting bagi kawasan dalam mewujudkan integrasi kawasan. Dalam konteks global, Indonesia juga berperan secara aktif dalam memelihara perdamaian dunia dan bantuan kemanusiaan dibawah bendera PBB, OKI maupun organisasi internasional lainnya.

Salah satu pidato kenegaraan yang mendasari politik luar negeri bebas aktif Indonesia berasal dari Mohammad Hatta pada tahun 1948, pada saat itu Hatta sebagai wakil presiden mengungkapkan bahwa terjadi pertarungan politik yang kuat dalam dunia internasional antara Amerika dan Soviet, meskipun begitu Indonesia harus memposisikan dirinya agar tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan Indonesia harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri, dan memperjuangkan tujuannya sendiri. Lebih lanjut lagi Hatta menjelaskan bahwa perjuangan Indonesia didasarkan atas semboyan percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan sendiri. Kondisi waktu itu juga masih berkaitan erat dengan perjuangan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, melepaskan pengaruh negara lain dan mendapatkan pengakuan dari negara lain (Hatta, 1953).

Politik luar negeri bebas aktif menunjukkan keinginan Indonesia sebagai negara yang terbuka untuk melakukan kerjasama dengan negara manapun tanpa menunjukkan kecenderungan aliansi politik tertentu, kerjasama luar negeri Indonesia bisa terbentuk dengan negara manapun selama dianggap menguntungkan bagi kedua negara dan tidak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri indonesia yang lain.

#### **b. Non aliansi dan Ketahanan Nasional**

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif berarti menandakan Indonesia untuk terbebas dari segala macam kerjasama internasional dalam

bidang pertahanan ataupun keamanan yang terikat dalam sebuah pakta ataupun aliansi. Keterlibatan dalam suatu pakta aliansi dianggap bertentangan dengan prinsip “bebas” politik luar negeri Indonesia.

Indonesia tidak menginginkan untuk mendapatkan perlindungan ataupun berada dibawah bayang-bayang negara kuat manapun, seperti Indonesia juga tidak menginginkan politik negaranya berada dalam pengaruh kekuatan manapun. Ikatan politik seperti aliansi juga akan menimbulkan resiko yang sangat tinggi dan dianggap akan merugikan kebebasan indonesia untuk melakukan hubungan baik dengan negara manapun.

Konsep ketahanan nasional memegang pengaruh kuat bagi prinsip non-aliansi ini. Bagi negara Indonesia ketahanan nasional diartikan sebagai: “kondisi kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara dalam rangka mewujudkan daya tangkal dan daya tahan untuk dapat mengadakan interaksi dengan lingkungan pada suatu waktu sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, yakni suatu masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila”. (UU Hubungan Luar Negeri, 1999)

Konsep ketahanan nasional juga didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 yang menyatakan bahwa Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. (UUD 1945). bentuk pertahanan negara bersifat semesta berarti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan.

Latar belakang sejarah juga menjadi alasan kuat Indonesia tetap menjalankan prinsip non aliansinya hingga saat ini. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri Gerakan Non Blok (GNB) bersamaan dengan Mesir,

Ghana, India, dan Yugoslavia. Bagi negara-negara anggotanya, GNB memiliki tujuan sebagai dukungan untuk menentukan nasibnya sendiri; mendukung kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas nasional. Tujuan lainnya adalah penentangan terhadap apartheid; tidak memihak pakta militer multilateral; perjuangan menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme; perjuangan menentang kolonialisme, neo-kolonialisme, rasisme, pendudukan, dan dominasi asing; perlucutan senjata; tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan hidup berdampingan secara damai; penolakan terhadap penggunaan atau ancaman kekuatan dalam hubungan internasional; pembangunan ekonomi-sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian internasional; serta kerja sama internasional berdasarkan persamaan hak (Kemlu, 2014).

Selain GNB, Keputusan untuk tidak terlibat aliansi juga terpengaruh keadaan kuat di masa lalu pada masa perang dingin dunia terbelah menjadi dua blok yang ekstrim antara blok barat dan blok timur. Dimana pihak timur berada dibawah Uni-Soviet, dan barat berada dibawah Amerika Serikat. Tindakan untuk tidak beraliansi menunjukkan penolakan kendali oleh negara superpower, sebagai pendirian dalam posisi bangsa menolak tekanan dari timur dan barat, dan juga merupakan solidaritas dari negara-negara berkembang.

Meskipun kebijakan non-aliansi mendapatkan banyak pengaruh dari keadaan di masa lalu terutama masa perebutan kemerdekaan dan awal kemerdekaan, tetapi hingga saat ini keputusan untuk tidak beraliansi masih menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Contohnya pada kebijakan pertahanan tahun 2016 oleh kementerian pertahanan yang masih menyatakan penyelenggaraan pertahanan negara tetap didasarkan pada visi misi Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong" (Kemhan, 2016).

### **c. Damai Dan Harmonis**

Sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang tertulis pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia menetapkan cara-cara politik internasional yang damai sebagai prinsip dasar politik luar negerinya. Politik luar negeri yang damai diwujudkan melalui diplomasi dalam mencari keharmonisan, keadilan, dan keserasian dalam hubungan antar negara, menjauhi sikap konfrontasi atau pun politik kekerasan, mendukung penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan di dunia, dan berusaha mungkin untuk berkawan dengan banyak negara dan tidak menciptakan lawan.

Dalam mendukung perdamaian dunia, Indonesia memantapkan kerjasama dengan negara-negara sahabat dalam kerangka pengembangan kemampuan (*capacity building*) dan meningkatkan peran aktif dalam *Peacekeeping Operation* (PKO) dan membuat regulasi pengerahan kekuatan TNI dalam tugas perdamaian dunia di bawah PBB dalam rangka diplomasi pertahanan (Kemhan, 2016).

Langkah nyata Indonesia dalam mendukung perdamaian internasional dibuktikan dengan melakukan mengirimkan pasukan misi pemeliharaan perdamaian semenjak 1956, Menurut UU Hubungan Luar Negeri RI, pengiriman pasukan tersebut terutama dikirimkan dalam rangka pasukan penjagaan perdamaian PBB Peran serta Indonesia dalam kegiatan internasional itu sesuai dengan Karena pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian merupakan pelaksanaan politik luar negeri, dalam mengambil keputusan, Presiden memperhatikan pertimbangan Menteri. Di samping itu karena pelaksanaan pengiriman pasukan atau misi perdamaian itu melibatkan berbagai lembaga pemerintah, maka pengiriman pasukan atau misi perdamaian demikian ditetapkan dengan Keputusan Presiden (UU hubungan luar negeri, 1999).

Mengenai prinsip damai dan perang bangsa Indonesia meskipun mencintai perdamaian, tetapi Indonesia lebih mencintai kemerdekaan dan

kedaulatannya. Hal ini juga merupakan prinsip dasar Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Adanya pertikaian ataupun pertentangan yang timbul antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui cara-cara damai. Peperangan bagi bangsa Indonesia adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Perang dilakukan dalam rangka melawan kekuatan negara lain yang secara nyata mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa Indonesia (UU Pertahanan Negara, 2002).

#### **d. Dynamic Equilibrium**

Istilah Dynamic Equilibrium (DE) mulai dimunculkan Indonesia semenjak kepemimpinannya di ASEAN pada tahun 2011, Indonesia sebagai negara '*rising middle power*' ingin meningkatkan perannya di Asia Pasifik untuk menghindari konflik regional atau adanya hegemoni kekuasaan dari Amerika Serikat dan China. DE merupakan strategi yang berlandaskan dari berbagai norma politik luar negeri yang telah disebutkan sebelumnya. Strategi ini digunakan untuk menghadapi major power dan bagaimana mensikapi mereka dengan mereka, DE merupakan modifikasi baru dari balance of power yang memperhatikan proses institusionalisasi, menghindari metode-metode yang agresif, dan menghargai pentingnya kesepakatan internasional.

Marty Natalegawa menjelaskan keadaan DE sebagai tidak adanya kekuatan hegemoni, blok politik, maupun geopolitik yang egois, melainkan keadaan internasional yang menunjukkan adanya keamanan bersama, kesejahteraan bersama, dan stabilitas bersama (Natalegawa, 2013).

Menurut Indonesia untuk menghindari konflik pada kawasan Asia Pasifik tidaklah dengan menggunakan perimbangan kekuatan, seperti yang dilakukan oleh Amerika, China, India, dan Rusia. Indonesia dan beberapa negara lain beranggapan perlu adanya suatu mekanisme regional yang dikendalikan oleh *middle power* yang tidak dominan, sistem tersebut kemudian

perlu membangun kepercayaan dan norma diantara semua pihak. Secara praktis, mekanisme regional tersebut berjalan pada beragam institusi ASEAN seperti East Asia Summit (EAS), ASEAN Defense Ministers Meeting Plus (ADMM+), dan ASEAN Maritime Forum (AMF). Mekanisme tersebut juga berjalan pada jaringan hubungan bilateral atau trilateral (Poling, 2013).

Melalui sistem tersebut diharapkan para *major power* regional tidak lagi memiliki perasaan 'kita' atau 'mereka' yang memiliki kepentingan saling bertentangan, tetapi dapat menjadi satu dalam beberapa forum dan mengharapkan akan pentingnya kerjasama yang saling menguntungkan (Poling, 2013).

#### **4.2.1.2 Norma yang dimiliki oleh Filipina**

Sikap Filipina terhadap hubungan internasionalnya salah satunya ditunjukkan pada Konstitusinya, terutama pada ayat 2 pasal 2 yang menyatakan bahwa Filipina telah meninggalkan perang sebagai instrumen kebijakan nasional, dan menerima hukum internasional sebagai bagian dari hukum negara dan menganut kebijakan yang sesuai dengan kedamaian, kesetaraan, keadilan, kebebasan, kerjasama dan persahabatan dengan segala bangsa (1987 Constitution of Republic Philippines, 2004).

Menteri Luar Negeri Filipina Albert F. del Rosario Menyatakan bahwa ada tiga pilar dalam kebijakan luar negeri Filipina yaitu: menjaga keamanan nasional, meningkatkan keamanan ekonomi, dan melindungi hak dan kesejahteraan warga Filipina di berbagai negara (Rosario, 2012).

Kebijakan luar negeri Filipina menunjukkan sikapnya yang idealis sekaligus pragmatis, hal tersebut tidak sepenuhnya bertentangan, kedua hal tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari negara dengan "small power" didalam dunia yang semakin kompleks dan tantangan yang semakin meningkat (Amador, 2015). Hal ini terutama jika membandingkan prinsip politik luar negeri filipina yang ingin disebut independent, tetapi melakukan kerjasama

berbentuk aliansi sekaligus mengharapkan daya gentar dan perlindungan dari negara lain yang lebih kuat.

Kebijakan luar negeri Filipina mendapat beberapa pengaruh kuat secara eksternal, terutama dari hubungannya dengan negara-negara di Asia Tenggara kemudian pengaruh kuat lainnya adalah aliansinya Amerika Serikat. Ikatan yang kuat dengan AS berdampak pada kebijakan luar negeri Filipina, Filipina sendiri merupakan aliansi kuat AS dan telah mendukung berbagai kebijakan luar negeri AS, termasuk keterlibatan Filipina dalam invasi Iraq dan *global war on terror*. Sedangkan di masa lalu dalam perang Korea dan perang Vietnam

Sedangkan secara internal nilai yang mendasari politik luar negeri Filipina adalah nilai-nilai tentang demokrasi dan hak asasi manusia bagi seluruh negara di dunia. Hal ini timbul setelah adanya konstitusi yang dimunculkan pasca revolusi rakyat terhadap penguasa diktator Filipina di masa lalu.

Norma yang diterapkan dalam kebijakan luar negeri yang terkait dengan kerjasama pertahanan dan keamanan Filipina secara umum terbagi atas tiga point, pertama, keinginan untuk menjadi negara dengan pengakuan internasional dan kesetaraan kedudukan yang meyakinkan Filipina memiliki keputusan yang mandiri; kedua, kesadaran akan dirinya sebagai negara kecil yang kemudian membuatnya harus bertindak realistis untuk melakukan kerjasama pertahanan dengan negara major power atau Amerika Serikat (AS) dengan bentuk aliansi; ketiga, penghormatan yang tinggi akan nilai-nilai demokrasi, dan bagi negara-negara lain yang juga

#### **a. Kebijakan Luar Negeri Filipina yang Independen**

Prinsip Filipina terhadap politik luar negeri yang Independen dinyatakan dalam konstitusinya Pasal 2 Ayat 7 yang isinya menyatakan bahwa Filipina bertujuan untuk mencapai kebijakan luar negeri yang Independen yang

melindungi kedaulatan nasional dan integritas wilayah, serta mendukung kepentingan nasional untuk memutuskan nasibnya sendiri (*self determination*).

Independen tidak berarti sendiri Filipina tetap melakukan hubungan dengan negara lain berdasarkan asas kesetaraan, berdasarkan asas kesetaraan tersebut maka Filipina berhak menentukan pilihannya sendiri tanpa adanya tekanan dari manapun, hubungan luar negeri Filipina dengan negara lain ditujukan untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Meskipun memiliki keyakinan akan politik luar negeri yang independen, Filipina menyadari bahwa negara kecil tidak memiliki modal yang sama dengan negara kuat dalam mencapai kepentingan luar negerinya, Filipina mengatasi kesenjangan tersebut dengan melakukan hubungan bilateral untuk meningkatkan status ekonomi dan politiknya. Sebagai contohnya hubungan Filipina dengan major power dan middle powers, dipengaruhi oleh keadaan strategis yang terjadi pada lingkungan regional dan global (Amador, 2015).

Oleh karena itu Filipina secara umum mendukung prinsip dari hukum internasional sebagai bagian dari hukum di Filipina, hal tersebut untuk mendukung kebijakan yang berlandaskan pada perdamaian, kesetaraan, keadilan, kebebasan, kerjasama, dan persahabatan.

Sebagai negara yang tidak memiliki kekuatan militer besar, Filipina mungkin saja tidak memiliki cara-cara yang sama dengan negara besar untuk memenuhi strategi utamanya (*grand strategy*), meskipun begitu mereka tetap memiliki kesempatan untuk mencoba untuk mengubahnya karena adanya niat yang kuat untuk bertahan hidup (Amador, 2015).

#### **b. Aliansi dengan Amerika Serikat**

Hubungan aliansi pertahanan antara Filipina dengan AS didasari atas pemikiran bahwa Filipina merupakan negara berkembang dan kekuatan militer yang tidak besar, oleh karena itu Filipina harus menjaga hubungan baiknya dengan negara yang memiliki kekuatan besar, selain itu juga timbulnya

tantangan keamanan ketika Filipina harus berhubungan dengan “*major power*” dan “*middle power*”. Filipina dan AS memiliki hubungan yang telah lama terjalin, rumit dan mengalami perubahan. Meskipun terjadi pasang surut hubungan dalam dinamikanya, AS tetap menganggap Filipina sebagai partner bilateral yang paling penting. Hubungan antara kedua negara tidak hanya dibentuk oleh Mutual Defense Treaty 1951, tetapi juga kesamaan sejarah, nilai demokrasi, dan prinsip (Amador, 2015).

Kerjasama pertahanan Amerika-Filipina ditandai dengan dibuatnya mutual defense treaty pada 1951, inti dari kesepakatan tersebut menyatakan bahwa kedua negara akan saling mendukung jika salah satu diantara mereka mendapatkan serangan dari negara lain. Sebelumnya juga telah ada kesepakatan 1947 tentang Military Bases Agreement yang menyatakan adanya markas militer AS di Filipina dan AS juga mendapatkan hak terhadap wilayah markas tersebut, kesepakatan tersebut ditetapkan untuk berlaku selama 99 tahun kedepan, meskipun kedepannya terhadapat beberapa amandemen lagi terhadap kesepakatan ini (The Mutual Defense Treaty Between The Philippines and US, 1951).

Kesepakatan Agreement on Enhanced Defense Cooperation kemudian dibuat pada 2014 yang akan memperluas cakupan kerjasama MDT 1951. Salah satu isinya menyatakan bahwa AS tidak akan mendirikan markas militer permanen, dan untuk menghormati hukum yang berlaku di Filipina.

Dalam kunjungan presiden Obama ke Filipina pada tahun 2014, kedua negara membuat kesepakatan baru bernama Enhanced Defence Cooperation Agreement (EDCA), yang memberi akses luas untuk AS terhadap militer Filipina seperti fasilitas militer Filipina, adanya penempatan pasukan AS secara bergilir, meningkatkan kerjasama dalam bidang seperti bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, juga termasuk sektor maritim. Isu EDCA masih akan diperiksa oleh Mahkamah Agung karena dianggap kontroversial dengan konstitusi negara. Ada juga perdebatan dalam negeri di Filipina terkait adanya

markas tentara asing EDCA, yang mana hal tersebut tidak diperbolehkan oleh konstitusi Filipina. EDCA diharapkan mampu mendukung dan melengkapi proses modernisasi angkatan bersenjata yang dilakukan oleh pemerintah Filipina. EDCA menunjukkan adanya komitmen kuat dari kedua negara untuk memperbarui dan memperkuat aliansinya, juga sebagai respon adanya tantangan dan ancaman baru yang muncul (Amador, 2015).

Aliansi militer antara kedua negara menimbulkan kontroversi ketika konstitusi menyatakan Filipina sebagai negara yang independen, dan kesepakatan tahun 1991 menyatakan bahwa tidak boleh ada pasukan asing, dan AS harus segera meninggalkan Filipina. Terlebih Filipina menyatakan bahwa dirinya bebas dari segala negara blok major power, dan merupakan anggota dari GNB.

Meskipun adanya kontroversi, relasi antara kedua negara tetap bagus hingga saat ini. Relasi yang terjalin bukanlah relasi yang bersifat asimetris dan ketergantungan yang sangat tinggi dari satu pihak. Relasi antara kedua negara mendukung adanya pertukaran kepentingan antara kedua negara dan kesamaan pandangan tentang tantangan dan ancaman yang dihadapi wilayah Asia Tenggara pada saat ini (Amador, 2015).

Hal yang dilakukan Filipina sebagai negara yang menganggap dirinya sebagai small power kemudian melakukan aliansi dengan AS kurang lebih sama dengan beberapa negara di Asia Tenggara yang juga melakukan hubungan aliansi militer dengan AS, seperti Vietnam dan juga Singapura. Motif yang sama terkait aliansi didasari oleh kepentingan pertahanan dan pemberian perlindungan dari negara yang lebih kuat, dan pada saat ini terkait Cina yang menjadi tantangan bagi beberapa negara di Asia Tenggara.

### **c. Demokrasi, Human Right, Good Government, Rule of Law**

Kebijakan luar negeri Filipina berakar pada nilai demokrasi yang dimiliki Filipina. Nilai-nilai demokrasi diabadikan menjadi landasan hukum dan

digunakan untuk memahami fenomena global, sekaligus mencerminkan posisi mereka dalam perpolitikan global. Perubahan pada sejarah telah membentuk masyarakat dan juga negara Filipina. Pengalaman masa penjajahan dan adanya revolusi masyarakat telah menjadikan Filipina memiliki apresiasi yang tinggi terhadap demokrasi dan perdamaian termasuk juga pada keamanan manusia, ketaatan akan hukum, pemerintahan yang baik, dan kehormatan akan kemanusiaan. Filipina percaya pada nilai-nilai internasional yang berdasarkan keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan (Rosario, 2012). Sebagai negara dengan small power, kepentingan filipina hanya dapat dicapai pada arena yang bebas dari adanya tekanan militer.

Revolusi masyarakat pada 1986 telah mengubah rezim otoritarian dan membawa gelombang demokratisasi, nilai-nilai tersebut kemudian menjadi nilai universal yang telah terinstitusionalisasi dan membawa pengaruh kuat dalam produk hukum dan kebijakan (Rosario, 2012).

Berikut ini adalah beberapa konstitusi yang mendukung bahwa negara Filipina mendukung nilai-nilai demokrasi dan terkait dengan politik luar negerinya (1987 Constitution of Republic Philippines, 2004):

- Pasal 2 ayat 2: Filipina telah meninggalkan perang sebagai instrumen dari kebijakan nasional, dan menerima hukum internasional sebagai bagian dari hukum negara dan menganut kebijakan yang sesuai dengan kedamaian, kesetaraan, keadilan, kebebasan, kerjasama dan persahabatan dengan segala bangsa.
- Pasal 2 ayat 3 – adanya supremasi otoritas sipil terhadap militer.
- Pasal 2 ayat 8 – menyatakan bahwa filipina mendukung kebijakan bebas nuklir bagi wilayahnya.
- Pasal 2 ayat 19 – Negara mendukung pembangunan ekonomi nasional yang mandiri, dan dikendalikan oleh warga negara filipina sendiri.

- Pasal 7 ayat 21 – Kesepakatan internasional atau treaty hanya akan berlaku dan syah setelah mendapatkan kesepakatan dari paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota dewan.

Ketaatan akan demokrasi dan dunia internasional membuat Filipina berkomitmen dengan berbagai norma dan peraturan internasional. Pada tingkat regional Filipina mendukung ASEAN dalam menciptakan kawasan yang damai, bebas dan stabil, termasuk juga mendukung sentralitas ASEAN. (Rosario, 2012) ASEAN merupakan salahsatu fokus penting kebijakan luar negeri Filipina, selain sebagai negara yang berperan dalam pendirian ASEAN, Filipina juga merupakan negara yang aktif berpartisipasi dalam membentuk agenda regional dan menjaga kepentingan ASEAN dalam politik internasional. (Amador, 2015)

Filipina merupakan sahabat bagi segala bangsa dan bukan musuh bagi negara manapun. Filipina tidak ingin menimbulkan suatu konflik, tetapi akan menjaga kepentingannya melalui cara-cara damai yang sesuai dengan hukum Internasional, dan berdasarkan pandangan bahwa setiap negara mempunyai hak yang sama. Secara internasional, Filipina selalu mendukung negara-negara sahabat yang memiliki nilai-nilai demokrasi dan perdamaian. (Rosario, 2012)

Cara pandang Filipina terhadap kebijakan luar negeri adalah liberal dan memandang hukum internasional sebagai elemen penting yang akan mengatur kebiasaan negara-negara. Selai itu mereka juga yakin pada institusi internasional untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar bangsa (Amador, 2015). Filipina menanggapi berbagai kasus kontemporer pada perpolitikan dunia dengan terus mengupayakan keamanan dan stabilitas pada politik internasional. Kebijakan luar negeri yang dilakukan filipina bukan merupakan dihasilkan melalui perhitungan yang sempit dan bukan merupakan produk dari tekanan dalam negeri (Rosario, 2012).

#### **4.2.1.3 Identitas Kedua Negara**

Nasionalisme merupakan salah satu identitas mendasar yang dimiliki oleh masing-masing negara, sama pula halnya antara Indonesia dan Filipina, dalam nasionalisme tersebut mencakup hal-hal seperti budaya, linguistik, politik dan berbagai material kelompok yang menghuni suatu wilayah geografi tersebut yang umumnya sebuah negara bangsa. Identitas suatu bangsa yang mencakup berbagai aspek tersebut membentuk suatu perasaan nasionalisme yang membuatnya beda dan unik antara satu negara dengan negara lainnya.

Hal yang mempengaruhi identitas suatu negara adalah terjadinya proses interaksi dan sosialisasi. Dalam proses tersebut, identitas dari pihak-pihak berbeda akan berbaur dan akan timbul adanya perasaan bersama. Hal tersebutlah yang akan perlahan merubah kepentingan suatu negara untuk menjadi kepentingan bersama.

Kedaulatan negara merupakan salah satu bentuk dari identitas suatu negara, kedaulatan merupakan bentuk nasionalisme dari wilayah geografis suatu negara. Pada umumnya kedaulatan akan menyatakan bahwa suatu negara berhak untuk menguasai atas apa yang menjadi wilayah kekuasaannya, dan oleh karena itu negara lain tidak memiliki wewenang untuk mengatur, ikut campur, ataupun mengintervensi wilayah negara lain.

Proses sosialisasi akan mengarah pada munculnya identitas bersama. Lalu adanya identitas bersama antara negara-negara akan memunculkan kepekaan akan tantangan ataupun masalah bersama yang memerlukan penanganan secara bersama-sama pula, sama pula dengan perasaan untuk memunculkan kerjasama yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang sama antara kedua negara.

Kerjasama pertahanan yang terbentuk antara kedua negara menandai adanya keinginan untuk memiliki perasaan 'bersama' atau identitas bersama. Banyaknya kerjasama yang muncul dari hubungan secara bilateral dan multilateral akan semakin menguatkan 'identitas bersama' tersebut. Identitas

bersama tersebut perlahan akan mengurangi identitas nasionalisme yang menghadang seperti identitas kedaulatan yang sangat ketat antara kedua negara. Sampai saat ini sudah terjadi kerjasama penjagaan batas yang memiliki pusat komando bersama di masing-masing daerah yang memungkinkan cepatnya pertukaran informasi keamanan antara ketiga negara.

#### **4.2.1.4 Proses Sosialisasi**

Kerjasama pertahanan kedua negara, melibatkan berbagai proses sosialisasi yang terjadi dalam beberapa level, pertama, yaitu level bilateral antara kedua negara, kedua, level sub-regional dalam kerjasama antara Indonesia, Filipina dengan Malaysia dibawah kerangka kerjasama Malphindo Trilateral Joint Patrol, lalu ketiga, terjadi pula proses sosialisasi dibawah kerangka regional ASEAN. Ketiga level proses sosialisasi dalam kerjasama tersebut akan dijelaskan lebih mendalam sebagai bahan analisis.

Pertama mengenai sosialisasi yang terjadi pada kerjasama biletaral antara kedua negara, seperti yang telah dijelaskan pada gambaran umum, kedua negara telah membentuk hubungan kerjasama semenjak pembentukan hubungan diplomatik pada tahun 1949. Pada tahun 1963 kedua negara juga membentuk kerjasama patroli terkoordinasi, dan dilanjutkan pada keterlibatan Indonesia sebagai tim pengamat dalam proses perdamaian antara pemerintah Filipina dengan milisi Moro National Liberation Front semenjak tahun 2012. Selain dalam bentuk kerjasama pertahanan dan keamanan, kedua negara juga banyak melakukan kerjasama di berbagai bidang karena posisinya yang bertetangga.

Kedua mengenai proses sosialisasi yang terjadi pada kerangka kerjasama subregional Malphindo antara kedua negara bersama dengan Malaysia. Dalam hal ini negara-negara yang terlibat membuat suatu institusi yang akan menjadi forum kerjasama pada bidang keamanan maritim dari ancaman terorisme dan pembajakan di laut. Proses institusionalisasi

berlangsung semenjak tahun 2016 dari semakin meningkatnya pembajakan di laut sulu, pemerintah Indonesia lalu memulai inisiatifnya untuk mengadakan suatu kerjasama yang dapat mencegah terulangnya pembajakan tersebut, dan meningkatkan kesadaran bagi negara-negara di kawasan perairan sulu-sulawesi dan sabah. Kerjasama tersebut juga dimunculkan karena susahnya pemerintah Indonesia dalam melakukan proses sekuritisasi pada wilayah yang bukan wilayah negaranya, oleh karena itu butuh kesepakatan internasional untuk menjangkau hal-hal tersebut.

Ketiga mengenai proses sosialisasi yang terjadi pada tingkat regional yaitu ASEAN. ASEAN menjadi instrumen bagi negara-negara anggotanya untuk melakukan sosiali dan pertukaran ide-ide. Ketika menjadi instrumen, organisasi internasional juga akan melalui proses dimana terjadinya sosialisasi antar negara-negara anggotanya. Dalam proses sosialisasi tersebut terjadi proses sistematis untuk melakukan pertukaran nilai-nilai kepada seluruh anggota. Pada level internasional, proses sosialiasi akan mempengaruhi negara-negara anggotanya, dan dampaknya akan berpengaruh pada bagaimana negara-negara bertindak pada lingkungan internasional. dengan demikian organisasi internasional memberikan kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan nilai kerjasama.

ASEAN adalah organisasi regional yang menjadi wadah bagi negara-negara yang berada dalam regional Asia Tenggara, ASEAN didirikan pada tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Saat ini ASEAN memiliki 10 negara anggota yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunie Darussalam, Laos, Myanmar, dan Cambodia.

Dalam deklarasi ASEAN, tujuan dari pembentukan ASEAN yaitu pertama, untuk meningkatkan pertumbuhan eknomi, kemajuan sosial, dan pembangunan berkebudayaan dalam lingkup regional melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kerjasama dalam rangka mewujudkan negara-negara Asia Tenggara yang damai dan sejahtera. Kedua,

mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui pengakuan rasa hormat dan keadilan, dan hukum internasional antara negara-negara anggota regional termasuk pula ketaatan terhadap piagam PBB. Ketiga, mempromosikan kerjasama yang aktif dan pendukung dalam masalah-masalah bersama seperti ekonomi, sosial, budaya, teknis, keilmuan, dan bidang administratif. Kelima, melakukan kolaborasi secara lebih efektif dalam bidang agrikultur dan industri, perluasan pasar, transportasi dan komunikasi, dan peningkatan standar hidup masyarakat. Keenam, mempromosikan studi asia. Dan ketujuh, untuk menjalin kerjasama ataupun membuka kesempatan yang menguntungkan dengan organisasi internasional lain(ASEAN, n.d.).

Mengenai masalah prinsip dasar, ASEAN menerapkan prinsip dasarnya berdasarkan dokumen *treaty of amity and cooperation in Southeast Asia* tahun (TAC) 1976, prinsip dasar tersebut terbagi atas 6 point yaitu (ASEAN, 1976):

- i. Saling menghormati akan kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, identitas nasional dari segala bangsa.
- ii. Mengakui hak segala bangsa untuk menjaga keberlangsungan negaranya dan terbebas dari segala macam campur tangan eksternal, tindak subversi ataupun koersi.
- iii. Tidak melakukan campur tangan dalam hubungan internal negara lain.
- iv. Penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai
- v. Menolak bentuk ancaman atau penggunaan kekuatan
- vi. Menjalinkan kerjasama yang efektif antar negara anggota.

Keenam prinsip tersebut telah disepakati bersama negara-negara anggota ASEAN ketika TAC tersebut juga disepakati, prinsip-prinsip tersebut kemudian dijaga dan hidup bersama-sama antara negara-negara ASEAN. Pembentukan ASEAN mencerminkan pembentukan dan perkembangan identitas regional. Pada saat deklarasi ASEAN Concord, juga telah dinyatakan

kepada berbagai pihak untuk lebih peka terhadap identitas regional untuk menjadi ASEAN yang kuat.

ASEAN membentuk ASEAN Regional Forum (ARF) pada tahun 1994 sebagai forum untuk dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik keamanan di kawasan, pembentukan juga ditujukan untuk tujuan pembentukan norma dan identitas seperti membahas menyamakan pandangan antara negara-negara ASEAN untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas keamanan kawasan. Selain sebagai dialog internal, ARF juga merupakan forum internasional yang dihadiri oleh negara-negara luar kawasan seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia, Uni Eropa dan lain-lain. Selain ARF, ADMM ataupun ADMM plus juga merupakan forum yang memiliki fokus pada bidang keamanan dan ketahanan regional, ADMM memfasilitasi kerjasama keamanan melalui pendirian *Expert Working Group*. Pembentukan ADMM juga diyakini sebagai sebuah cara untuk meningkatkan perdamaian regional dan stabilitas melalui kerjasama dalam pertahanan dan keamanan untuk menghadapi masalah keamanan lintas negara.

Pada forum ARF dan ADMM plus terjadi pula proses sosialisasi yang melampaui kawasan regionalisme karena adanya anggota yang berasal dari luar Asia Tenggara seperti Amerika Serikat dan China. Forum seperti ini akan berfungsi untuk menghilangkan kesenjangan yang timbul antara negara-negara *major power* dengan negara *major power lainnya* maupun antara negara anggota aliansinya dengan negara lain yang bukan anggota aliansi negara major power tersebut.

#### **4.2.2. Kendala Pemerintah Indonesia dalam kerjasama pertahanan Indonesia dengan Filipina**

##### **a. Solidaritas**

Kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh kedua negara memiliki latar belakang sejarah yang panjang dari banyaknya pembentukan kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara di masa lalu, beragamnya bentuk kerjasama

seperti seminar, pencegahan persebaran terorisme dapat saja menjadi tanda bahwa kerjasama pertahanan yang terjadi sudah cukup solid. Hingga awal 2016 saja sudah dibentuk kerjasama penjagaan perbatasan melalui patroli terkoordinasi.

Meskipun begitu hal yang berbeda tentang solidaritas kerjasama dinyatakan oleh Dumadi, Menurutnya kerjasama pertahanan yang terjadi antara kedua negara tidak sekuat yang diharapkan, adanya hambatan pada pertukaran informasi menjadi salah satu kendalanya, yaitu ketika Indonesia memberikan informasi intelijen kepada Filipina, Filipina tidak melakukan pertukaran baik hal tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan Indonesia terhadap Filipina. Dumadi juga menjelaskan bahwa terjadi masalah komunikasi lain yang terjadi antara kedua negara terkait masalah keamanan, yaitu ketika pihak Filipina menyatakan bahwa telah ditemukan teroris dengan kartu tanda pengenal kewarganegaraan Indonesia, menurutnya pihak Filipina tidak terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan pihak Indonesia tetapi memilih untuk memberitahu informasi tersebut kepada pihak media, padahal kedua negara sudah memiliki kerjasama dalam penanggulangan terorisme dan pertukaran informasi intelijen (Hastin Dumadi, Komunikasi Personal, 2 November 2017).

Kurangnya komunikasi strategis yang dilakukan oleh pihak Filipina menandakan bahwa belum sepenuhnya solidaritas Filipina untuk memberikan informasinya kepada pihak Indonesia. Dalam hal ini juga terkait masalah belum kuatnya kepercayaan pihak Filipina terhadap rekan kerjasama keamanannya.

#### **b. Keterbatasan wilayah operasi**

Kerjasama pertahanan dan keamanan Indonesia dengan Filipina telah terbentuk pada wadah kerjasama keamanan tiga negara antara Indonesia, Malaysia dan Filipina bernama Malphindo yang terbentuk pada 2016. Menurut Hasanuddin, dalam kerjasama Malphindo tersebut, kegiatan utama yang dilakukan adalah latihan dan patroli bersama yang tetap dilakukan pada

wilayah negaranya masing-masing. Tidak dilakukan pemberian wewenang untuk melintas. Indonesia tetap bertanggung jawab pada wilayahnya sendiri. Jika misalkan ada izin untuk melintas maka perlu melapor terlebih dahulu ke posko yang telah disediakan, dengan alasan yang jelas maka mereka dapat melintasi wilayah negara tuan rumah sesuai dengan izin dan pengawalan dari pasukan mereka. hal tersebut juga bersifat sementara dan tidak selamanya (Tubagus Hasanuddin, komunikasi personal, 11 Oktober).

Lebih jauh Hasanuddin menjelaskan bahwa pemberian batas wilayah untuk latihan bersama yang melintasi wilayah negara tidak mungkin terjadi, kesepakatan tersebut jika ingin terjadi maka harus dibuat dalam perjanjian khusus oleh kedua negara yang memerlukan persetujuan dari DPR (Tubagus Hasanuddin, komunikasi personal, 11 Oktober). Oleh karena itu masalah keterbatasan wilayah operasi sangat berkaitan erat dengan kerangka hukum atau belum adanya aturan maupun kesepakatan yang memungkinkan untuk memperbolehkan pasukan untuk melakukan operasi lintas batas pada masa awal kerjasama dibentuk.

Keterbatasan wilayah operasi terkait erat dengan prinsip negara-negara ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lainnya atau melakukan intervensi. Tindakan intervensi adalah salah satu masalah yang menjadi perhatian dalam keterlibatan suatu negara asing dalam masalah yang terjadi di suatu negara, terutama sekali masalah penempatan militer asing. Dumadi menjelaskan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan oleh Indonesia, tetapi jika hal tersebut memang diperlukan dan besarnya kebutuhan maka mungkin saja dilakukan. Tindakan intervensi seperti pelibatan operasi militer pada negara lain tersebut jika memang dibutuhkan harus melalui suatu proses yang tidak mudah dan tidak bisa dilakukan dengan cepat (Hastin Dumadi, Komunikasi Personal, 2 November 2017). Oleh karena itu pada awal pembentukan kerjasama masih terjadi berbagai kendala dari kedua negara untuk sebisa mungkin menghindari tindakan preventif yang memungkinkan

tindakan intervensi, dan tetap menahan diri sambil mengupayakan berbagai dialog dan kerjasama.

### **c. perbedaan metode dan strategi dalam kebijakan pertahanan**

Salah satu yang menjadi indikator dalam kuatnya kerjasama antar negara adalah terjadinya penyesuaian dalam kebijakan pertahanan suatu negara. Dumadi menjelaskan Hal yang mendasar pada doktrin pertahanan dan keamanan antara kedua negara adalah metode dalam penanggulangan terorisme. Jika di Indonesia terorisme dianggap sebagai tindak pidana dan ditangani oleh polisi, sedangkan di Filipina, terorisme merupakan tanggung jawab pihak militer (Hastin Dumadi, Komunikasi Personal, 2 November 2017).

Hasanuddin menjelaskan bahwa Indonesia tidak melakukan penyesuaian ketika melakukan kerjasama pertahanan dengan negara lain. Adanya penyusunan strategi ditentukan berdasarkan ancaman bukan berdasarkan dengan kerjasama dengan negara lain, hal tersebut menurutnya tidak ada hubungannya, kecuali jika Indonesia terlibat dalam suatu pakta pertahanan (Tubagus Hasanuddin, komunikasi personal, 11 Oktober).

Perbedaan masih terjadi karena proses penyeragaman pada angkatan bersenjata paling mungkin terjadi pada kerjasama yang sudah berbentuk pakta pertahanan yang telah melakukan operasi bersama, ataupun memiliki pasukan bersama seperti pasukan penjagaan perdamaian, sedangkan Indonesia dengan Filipina maupun ASEAN tidak memiliki pasukan ASEAN ataupun bentuk kerjasama seperti bentuk-bentuk kerjasama tersebut.

### **d. Prinsip Indonesia yang mencegah bentuk pertahanan yang mengikat**

Hasanuddin wakil ketua komisi 1 DPR RI menyatakan bahwa yang menjadi prinsip bagi Indonesia ketika akan melakukan kerjasama dengan negara lain yaitu bebas aktif, bebas aktif dalam hal melawan penjajahan dan aktif dalam mendorong perdamaian dunia. Prinsip lainnya adalah Indonesia tidak boleh terlibat dalam pakta atau perjanjian pertahanan, kerjasama hanya

dibolehkan dalam hal pertukaran data intelejen, pelatihan, pertukaran teknologi, bantuan logistik (Tubagus Hasanuddin, komunikasi personal, 11 Oktober).

Prinsip politik luar negeri Indonesia yang tidak memungkinkan Indonesia terlibat pakta pertahanan belum tentu menjadi kekurangan, Indonesia telah menentukan untuk tidak terlibat dalam aliansi pertahanan dengan negara lain, menurut Hasanuddin jika dikaitkan dengan pemikiran tentang perang dan damai, Indonesia itu mencintai perdamaian tetapi lebih cinta kemerdekaan, dan Indonesia hanya akan bertempur jika kemerdekaan dan kedaulatannya diserang negara lain. Dan hal tersebut menurutnya bukan menjadi kekurangan tetapi malah menjadi kelebihan. Indonesia tidak memiliki landasan hukum jika harus ikut berperang ke Filipina dan berarti mencampuri masalah internal yang ada di Filipina, kerjasama keamanan hanya dimungkinkan dalam bentuk penjagaan keamanan dibawah PBB dengan aktivitas yang terbatas seperti pengamat dan penjagaan keamanan (Tubagus Hasanuddin, komunikasi personal, 11 Oktober).

Akibat tidak adanya kesepakatan pertahanan antara Indonesia dengan Filipina, oleh karena itu tidak memungkinkan ada operasi militer yang melewati batas negara. Hasanuddin menjelaskan aktivitas operasi militer seperti itu membutuhkan perjanjian khusus yang harus melalui persetujuan DPR. Setelah itupun masih ada beberapa proses lainnya seperti ketika suatu pasukan ingin melintasi batas wilayah negara lain, proses tersebut yaitu mereka harus melapor terlebih dahulu ke pos yang telah disediakan, dengan alasan yang jelas maka mereka dapat melintasi wilayah tersebut sesuai dengan izin yang telah diberikan, aktivitas yang mereka lakukan kemudian juga mendapatkan pengawalan dari pasukan negara tuan rumah. Posko tersebut sudah dimiliki dua negara dan menjadi seperti atase pertahanan (Tubagus Hasanuddin, komunikasi personal, 11 Oktober).

Dumadi menjelaskan prinsip utama yang dipakai dalam politik luar negeri Indonesia adalah prinsip non-intervensi, meskipun begitu menurutnya tidak berarti Indonesia tidak membantu memperbaiki masalah yang terjadi di negara lain, Indonesia akan tetap membantu dengan cara membuat kesepakatan dengan semua pihak yang berkaitan. Terkait dengan kerjasama anti terorisme dengan Filipina sendiri Indonesia juga memiliki mengajukan suatu institusi dalam negeri khusus dalam pemberantasan terorisme dan kejahatan lintas negara, Jakarta Law Enforcement Center (Hastin Dumadi, Komunikasi Personal, 2 November 2017).

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Dinamika dalam norma, identitas dan proses sosialisasi**

Dalam teori konstruktivisme, norma dan identitas berperan sangat penting sebagai faktor yang mempengaruhi pembentukan kerjasama pertahanan antar negara, kedua faktor tersebut bertemu dalam suatu proses sosialisasi yang kemudian akan memunculkan identitas baru ataupun norma norma baru yang sifatnya kolektif.

Mengenai masalah norma ada beberapa norma yang dapat berjalan seiringan antara kedua negara ada pula norma yang tidak berjalan karena sifatnya bertentangan, prinsip yang tidak mungkin berjalan adalah tentang aliansi, sedangkan prinsip-prinsip lain yang dianut oleh Indonesia dan Filipina seperti tentang demokrasi, politik luar negeri yang dinamis, dan mencintai perdamaian dapat berjalan beriringan untuk menjadi dasar dalam pembentukan kerjasama.

Prinsip tentang aliansi merupakan prinsip yang paling menjadi pembeda yang sangat jelas bagi negara Indonesia dan Filipina, dimana Indonesia sangat berkomitmen untuk menjadi negara yang menolak melakukan kerjasama berbentuk pakta pertahanan ataupun aliansi militer, di lain pihak Filipina meskipun mengaku sebagai negara yang memiliki politik luar negeri yang

*independent* tetapi juga merupakan negara yang melakukan aliansi dengan negara *major power*.

Kepercayaan diri menjadi hal yang sangat mendasar dalam perbedaan prinsip ini. Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat bahkan semenjak Indonesia pertama kali menyatakan kemerdekaannya Indonesia sangat yakin dengan kekuatan yang dimilikinya, hingga saat ini beberapa analis menganggap Indonesia sebagai negara *middle power*, selain itu Indonesia juga sangat yakin bahwa negaranya mampu berperan banyak dalam politik internasional.

Filipina dalam pernyataan langsung oleh menteri luar negerinya menunjukkan bahwa negaranya merupakan negara *small power*, dan perlu mengambil suatu langkah kerjasama untuk menghadapi ketimpangan kekuatan dengan negara-negara *middle power* dan *major power* (Rosario, 2012). Atas kesadaran tersebut, secara realistis Filipina menganggap bentuk kerjasama aliansi militer merupakan langkah kerjasama yang tepat dalam menghadapi ketimpangan kekuatan tersebut, sekaligus memberikan efek *deterrence* bagi negaranya.

Latar belakang sejarah juga memberi pengaruh bagi prinsip yang dianut oleh kedua negara, Indonesia sebagai negara dengan latar belakang negara yang sangat menentang kolonialisme dan kekuasaan negara barat sekaligus menolak bergabung dengan blok timur membuatnya menolak terlibat dalam kerjasama berbentuk aliansi. Pada masa awal perjuangan kemerdekaan aliansi militer dengan negara *major power* dianggap tidak cocok dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia karena dianggap berdampak tidak baik bagi kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Salah satu perumusan pemerintah dilakukan pada 1948 dalam rapat yang dipimpin oleh wakil presiden Hatta yang isinya menyatakan bahwa Indonesia menolak bergabung dengan blok kekuatan manapun.

Indonesia juga merupakan negara yang unik dan berbeda dengan kebanyakan negara di ASEAN, Profesor Yanyan Mochamad, seorang guru besar Universitas Padjajaran sekaligus pengamat terorisme, menyatakan bahwa hampir seluruh negara ASEAN melakukan aliansi pertahanan dengan negara besar seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei yang merupakan anggota persemakmuran yang mendapatkan banyak bantuan dari United Kingdom; Filipina dan Thailand mendapatkan dukungan pertahanan yang kuat dari AS; sedangkan Laos, Myanmar dan Kamboja mendapat pengaruh yang sangat kuat dari China. Indonesia dalam kasus ini merupakan negara yang tidak memiliki pakta pertahanan ataupun aliansi dengan *major power*. Dalam sistem aliansi ketika suatu negara diserang maka negara yang menjadi aliannya harus membantu pertahanannya, Indonesia berusaha untuk terlibat dalam bentuk kerjasama seperti itu (Yanyan Mochamad, Komunikasi Personal, 10 November 2017).

Oleh karena itu akan sangat sulit dan hampir tidak mungkin untuk Indonesia mengirimkan pasukannya untuk ikut bertempur bersama dengan tentara Filipina melawan teroris di Marawi. Tubagus Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki landasan hukum untuk memerangi musuhnya Filipina, kerjasama yang paling memungkinkan yaitu pengiriman pasukan perdamaian dibawah PBB, dan tugasnya hanya terbatas pada pengamat militer dan pasukan penjaga perdamaian. Dalam ASEAN juga tidak memungkinkan untuk melakukan intervensi dan melakukan pakta pertahanan. Kerjasama militer ASEAN memungkinkan tetapi tidak berbentuk pakta atau aliansi (Tubagus Hasanuddin, komunikasi personal, 11 Oktober).

Salah satu prinsip yang berlaku dalam kawasan adalah untuk menghindari tindakan intervensi dan untuk menjaga stabilitas keamanan di ASEAN. Indonesia sebagai negara yang merasakan dampak dari kuatnya kelompok teroris dari penculikan dan pembajakan pada kasus ini tetap

menahan diri untuk tidak melibatkan kekuatan militernya untuk terlibat dalam krisis yang ada di Filipina ataupun dalam operasi militer pembebasan sandera. Indonesia menyadari bahwa kedua negara perlu menahan diri untuk menjaga stabilitas ASEAN dan menahan diri dari tindak intervensi terutama intervensi militer secara langsung.

Keyakinan kedua negara akan ASEAN dalam menangani masalah krisis tersebut disambut ASEAN melalui badan kemanusiaannya yang akhirnya mendapatkan persetujuan dengan Filipina untuk bisa masuk memberikan bantuan berupa alat-alat untuk pengungsi kota Marawi.

Identitas negara tentang kuatnya perasaan nasionalisme juga mengalami dinamika ketika kedua negara melakukan proses sosialisasi atau kerjasama di dalam berbagai forum. Dinamika yang terjadi saat ini mengarah pada adanya perasaan bersama, identitas bersama, kesejahteraan bersama serta kesadaran akan ancaman bersama.

Proses sosialisasi dan institusionalisasi yang terjadi pada berbagai level kerjasama perlahan memunculkan identitas baru. Norma-norma dalam hal ini masih menjadi pegangan utama dari masing-masing negara tetapi proses sosialisasi tersebut akan berusaha mencari kemungkinan titik temu untuk membentuk identitas bersama berdasarkan norma-norma yang dapat berjalan bersamaan antara Indonesia dan Filipina. Berkembangnya berbagai forum kerjasama yang dimunculkan antara Indonesia dan Filipina berarti semakin banyak dan semakin rutin proses sosialisasi terjadi antara kedua negara, dengan perkembangan tersebut berarti semakin banyak juga institusi yang dimunculkan dari kedua negara untuk pembentukan identitas bersama.

Proses sosialisasi dan institusionalisasi di level ASEAN juga berdampak pada munculnya norma-norma bersama antara negara-negara ASEAN, atau menjadi norma ASEAN, norma yang perlu diperhatikan dalam ASEAN adalah menghindari cara kekerasan dalam penyelesaian masalah, kedua terkait

dengan prinsip non-intervensi pada urusan internal suatu negara, ketiga penolakan terhadap bentuk pakta militer. Keempat, tentang ASEAN way.

Prinsip menghindari penggunaan cara-cara kekerasan dalam penyelesaian masalah yang dimiliki oleh ASEAN dilandasi akan komitmen yang kuat untuk menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan. Melalui ASEAN diharapkan mereka mampu untuk membuat mekanisme untuk menghindari peperangan dan manajemen konflik. ASEAN mengeluarkan prinsip dasarnya pada dua point yaitu “menghindari cara-cara kekerasan” dan “penyelesaian sengketa internasional dengan cara-cara damai”.

Prinsip non-intervensi negara-negara ASEAN terhadap urusan negara ASEAN lainnya memiliki latar belakang dari kuatnya intervensi negara superpower terhadap perpolitikan di ASEAN, saat ini prinsip tersebut diharapkan untuk mengakui penghargaan bahwa semua negara besar ataupun kecil memiliki hak yang sama untuk terbebas dari intervensi dalam masalah politik internalnya. Tindakan intervensi dipercaya sebagai bentuk merusak kebebasan, kemerdekaan, dan integritas suatu negara.

Prinsip penolakan menjadi bentuk pakta militer diyakini ASEAN dengan landasan bahwa unsur-unsur keamanan nasional tidak bergantung dari suatu aliansi militer yang mengandalkan keamanan negaranya dibawah perlindungan kekuatan negara besar lainnya. ASEAN yakin akan ketahanan nasional yang berasal dari kekuatan negaranya sendiri, dan berasal dari faktor-faktor domestik seperti ekonomi, sosial, stabilitas politik, dan rasa nasionalisme.

Prinsip ASEAN way memiliki banyak interpretasi dan penjelasan dari masing-masing negara anggotanya. ASEAN Way dapat juga menegaskan keadaan informal, inklusivitas, konsultasi yang intensif, dan resolusi damai dari suatu sengketa. ASEAN way juga dapat menjelaskan ketika para pemimpin ASEAN memiliki hubungan yang sangat dekat dan terbentuk cukup lama seperti layaknya teman lama yang sudah saling mengerti satu sama lainnya.

Prinsip Dynamic Equilibrium dari Indonesia menunjukkan adanya keinginan untuk membangun stabilitas regional dengan melibatkan berbagai negara baik anggota ASEAN maupun negara *major power* seperti Amerika dan China yang memiliki pengaruh kuat di Asia Pasifik untuk dapat terlibat dalam suatu institusi dan merumuskan kepentingan bersama mengenai kesejahteraan dan keamanan regional. Melalui proses tersebut berarti Indonesia memiliki keinginan untuk melibatkan Filipina bersama negara-negara lain untuk menciptakan suatu identitas bersama dalam menangani masalah stabilitas regional.

#### **4.3.2 Tanggapan pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Kendala Kerjasama Pertahanan dengan Filipina dalam Krisis di Marawi**

Pada bagian ini akan dibahas bagaimana pemerintah Indonesia menghadapi berbagai kendala pembahasan dilakukan berdasarkan berbagai konsep tentang indikator keberhasilan kerjasama pertahanan antar negara.

##### **a. Perbedaan metode dan doktrin**

Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa Indonesia dengan Filipina memiliki perbedaan pada cara penanggulangan masalah keamanan berupa terorisme, jika di Filipina dilakukan dengan menggunakan militer, Indonesia menggunakan polisi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam masalah terorisme.

Terkait adanya perbedaan doktrin dalam kerjasama pertahanan, menurut Hasanuddin hal tersebut tidaklah menjadi penghalang bagi kerjasama pertahanan antar negara. Doktrin menurutnya dibuat untuk kebutuhan masing-masing negara dan tidak bisa diadukan atau dipaksakan sama, doktrin yang dimiliki suatu negara juga belum tentu bisa diterapkan di negara lain (Tubagus Hasanuddin, komunikasi personal, 11 Oktober).

Adanya perbedaan dalam institusi yang menangani masalah terorisme dari masing-masing negara bukan menjadi penghalang karena masing-masing

negara sudah memiliki badan koordinasi yang menangani masalah terorisme, seperti di Indonesia yang memiliki badan Nasional penanggulangan Terorisme (Hastin Dumadi, Komunikasi Personal, 2 November 2017).

#### **b. Kapasitas Pertahanan**

Perbedaan dalam kapasitas pertahanan menurut Hasanuddin tidak mempengaruhi kelancaran dalam kerjasama pertahanan, menurutnya tiap negara memiliki ancaman masing-masing dan hal tersebut tidak bisa dibandingkan. Saat ini Indonesia sudah merasa negaranya cukup kuat, begitu juga Filipina yang menjalin aliansi dengan Amerika Serikat. Dan hal tersebut menurutnya tidak berpengaruh dalam kerjasama pertahanan yang dibentuk oleh kedua negara (Tubagus Hasanuddin, komunikasi personal, 11 Oktober).

Perbedaan kapasitas pertahanan yang sangat signifikan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dan rasa takut akan dominasi negara yang lebih besar. Tetapi yang terjadi antara Indonesia dengan Filipina, tidak terjadi kesenjangan yang begitu besar dalam kapasitas pertahanan. Indonesia meskipun yakin akan luasnya wilayah negaranya yang dapat menjadi kekuatan tetapi tidaklah bersifat agresif, kedua negara juga banyak terlibat aktif dalam kerjasama untuk stabilitas kawasan.

#### **c. *Trust Building***

Masalah trust building yang belum terbangun secara sempurna, dan masih adanya kendala dalam pertukaran informasi memang masih menjadi salah satu kendala bagi solidaritas kerjasama keamanan dua negara, oleh karena itu Dumadi menyatakan bahwa dengan ketiga negara membuat kerjasama trilateral maka ketiganya akan semakin sering melakukan pertemuan, dan akan semakin mengenal satu sama lain, dengan proses seperti itu maka tingkat saling percaya antar negara akan semakin tinggi (Hastin Dumadi, Komunikasi Personal, 2 November 2017)

Dalam bersahabat dengan negara lain ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, Heru Okta menjelaskan bahwa Indonesia meskipun memiliki kedekatan dengan suatu negara juga harus menjaga kewaspadaan, kewaspadaan dibangun untuk mendukung keamanan bukan dalam kecurigaan dan kondisi siap berperang, menurutnya dalam membangun kawasan yang harus dilakukan bukan saling berkompetisi tetapi bersama-sama membangun kesejahteraan. Dan dampak yang dirasakan sangat bagus saat ini, Asia Tenggara menjadi kawasan yang stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang baik (Heru Okta, Komunikasi Personal, 23 Oktober 2017). Oleh karena itu perlu diciptakan sebuah upaya pembangunan kepercayaan yang berkepanjangan antara kedua negara untuk memperkuat solidaritas kerjasama pertahanan.

#### **d. Keterlibatan berbagai level perwira**

Indikator lain yang menunjukkan terjadinya kerjasama keamanan adalah sudah dilakukannya pelibatan perwira militer dari berbagai tingkatan. Dumadi berkomentar bahwa dalam kerjasama saat ini kedua negara telah bekerjasama dari hal yang sifatnya prinsip hingga pada pelaksanaan teknis seperti patroli bersama, kerjasama pun terbentuk dalam lingkup bilateral, trilateral, hingga multilateral. Dalam kerjasama yang sangat luas seperti ini pasti kedua negara sudah melakukan pelibatan perwira militer dari berbagai tingkatan (Hastin Dumadi, Komunikasi Personal, 2 November 2017).

Pelibatan perwira angkatan bersenjata dari berbagai level antara negara-negara yang bekerjasama menandakan tingginya rasa kepercayaan antara kedua negara, pelibatan perwira tersebut akan meningkatkan rasa kebersamaan antara angkatan bersenjata dari negara-negara yang terlibat, kedua pihak juga akan lebih mengenal satu sama lain. hal tersebut lalu juga memungkinkan kerjasama keamanan yang lebih stabil dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Kerjasama dengan pelibatan berbagai level perwira juga akan memungkinkan pengembangan ragam bentuk kerjasama seperti yang terjadi pada patroli bersama Indomalphi.

#### **e. Kesamaan geografi**

Kesamaan geografi juga menjadi salah satu indikator yang bagus bagi negara-negara untuk menjalin kerjasama pertahanan yang ideal. Indonesia dan Filipina dalam hal ini merupakan negara yang memiliki posisi geografis berbatasan langsung, kondisi geografis dari kedua negara juga menunjukkan kesamaan yaitu kondisi negara kepulauan. Kedekatan dan kesamaan wilayah geografis tersebut membuat kedua negara membuat kedua negara akan lebih mudah mereka saling memahami kondisi keamanan dan pertahanan diantara mereka, berarti juga memahami apa saja kebutuhan-kebutuhan mereka.

Kondisi geografis yang memiliki banyak kesamaan dan juga posisi yang bertetangga akan memperkuat kecenderungan suatu negara untuk melakukan kerjasama entah secara bilateral ataupun bersama dalam kerangka organisasi regional, kebutuhan ini selain untuk meningkatkan kualitas pertahanan dan keamanan, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas kawasan dan perdamaian. Hal ini secara nyata ditunjukkan oleh beragamnya bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan yang dibentuk oleh kedua negara, selain bekerjasama secara bilateral, kedua negara juga aktif dalam berbagai macam forum regional dibawah ASEAN, belum lagi keduanya baru-baru ini membentuk kerjasama trilateral bersama dengan Malaysia.

Mengenai solidaritas kerjasama antara kedua negara, Heru Okta menjelaskan bahwa kerjasama umumnya terjadi karena adanya kepentingan antara pihak yang terlibat. Tetapi beda halnya jika kedua pihak tersebut merupakan tetangga yang bersebelahan langsung, menurutnya tetangga berarti harus menjaga keharmonisannya dan stabilitasnya, suatu negara juga tidak bisa menentukan akan bertetangga dengan negara siapa karena hal tersebut ditentukan oleh posisi geografis negaranya. Oleh karena itu menurutnya bertetangga merupakan keniscayaan, negara tetangga menurutnya adalah negara yang paling mengerti Indonesia, sikap yang diambil oleh Indonesia bagaimanapun harus baik dengan Filipina dan negara-

negara tetangga lainnya. Atas berbagai pertimbangan itu hubungan kerjasama dan hubungan militer kedua negara maka harus baik, jika tidak baik atau belum baik, harus diupayakan untuk menjadi baik (Heru Okta, Komunikasi Personal, 23 Oktober 2017).

#### **f. Menghadapi Tindak Intervensi**

Salah satu indikator keberhasilan suatu kerjasama lainnya adalah adanya aktivitas militer bersama yang memungkinkan militer dari negara lain untuk beroperasi di wilayah tertentu dari negara penerima. Wilayah yang dimaksud biasanya sangat terbatas pada wilayah tertentu yang telah ditentukan oleh kesepakatan yang telah ditentukan oleh pemerintah kedua negara.

Tindakan intervensi adalah salah satu masalah yang menjadi perhatian dalam keterlibatan suatu negara asing dalam masalah yang terjadi di suatu negara, terutama sekali masalah penempatan militer asing. Dumadi menjelaskan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan oleh Indonesia, tetapi jika hal tersebut memang diperlukan dan besarnya kebutuhan maka mungkin saja dilakukan. Tindakan intervensi seperti pelibatan operasi militer pada negara lain tersebut jika memang dibutuhkan harus melalui suatu proses yang tidak mudah dan tidak bisa dilakukan dengan cepat.

Berbagai pertimbangan juga harus dipikirkan ketika akan melakukan tindakan intervensi. Indonesia sesungguhnya telah memiliki kerjasama dengan Filipina dalam hal penempatan pasukan, semenjak tahun 2012 Indonesia sudah mengirim tim dari TNI dan Kementerian Luar Negeri, hal ini dilakukan dalam rangka peran Indonesia sebagai *international monitoring team* yang mengawal proses perdamaian di Mindanao. Dalam kasus tersebut tim Indonesia hanya melakukan pengawasan antara kelompok Separatis MILF dengan kelompok pemerintah Filipina (Hastin Dumadi, Komunikasi Personal, 2 November 2017).

Sikap non-intervensi menurut HASTIN tidak selamanya mendapatkan dukungan, seperti sikap non-intervensi ASEAN, hal tersebut terkadang mendapatkan kritik dari dunia barat, kritik tersebut terkait dengan tidak melakukan intervensi berarti ASEAN sama seperti tidak melakukan apa-apa dalam menghadapi suatu kasus yang perlu perhatian lebih. Dumadi menjelaskan bahwa Indonesia menghormati prinsip tersebut tetapi tetap harus melakukan sesuatu ketika sampai terjadi kritis. Prinsip untuk tidak melakukan intervensi menurut hastin tetap harus dihormati, hal tersebut menyangkut keinginan Indonesia untuk mendapatkan penghormatan dari negara lain, dia meyakini setiap negara memegang hal tersebut secara teguh, jika tidak maka setiap negara bisa beroperasi di negara lain dengan seenaknya (Hastin Dumadi, Komunikasi Personal, 2 November 2017).

Prinsip non intervensi sebenarnya membawa dua dampak, yaitu keuntungan dan kekurangan. Menurut Kolonel Heru Okta dari Kementerian Pertahanan, intervensi yang dikaitkan dengan pengiriman bantuan pasukan ke Filipina tidak memiliki landasan hukum. Memang Indonesia harus ikut menjaga ketertiban dunia, tetapi dengan intervensi perlu diperhatikan apakah hal tersebut dilakukan dampaknya akan lebih baik atau sebaliknya, resiko yang harus diterima juga besar, seperti biaya dan juga kemungkinan korban jiwa (Heru Okta, Komunikasi Personal, 23 Oktober 2017).

Kedua negara hingga saat ini juga telah mengembangkan bentuk kerjasamanya hingga memungkinkan terlibatnya angkatan bersenjata negara lain pada operasi lintas batas, kerjasama tersebut dimunculkan melalui patroli udara bersama Indomalphi. Pada operasi tersebut negara tuan rumah akan menjadi pemimpin lalu anggota negara lain akan terlibat pada patroli di wilayah negara tuan rumah dibawah komando dari perwira negara tuan rumah. Meskipun tidak dibawah kendali langsung oleh komando dari pemimpin pasukan negara asal, tetapi perkembangan tersebut telah menjadi bukti

terjadinya pengengemangan kerjasama yang tidak lagi mengkhawatirkan akan terjadinya tindak intervensi militer negara lain di negaranya.

#### **g. Pengembangan Bentuk Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Filipina di masa depan**

Perlu diperhatikan pula apapun bentuk pengembangan dalam kerjasama tersebut, Indonesia untuk tidak melakukan aliansi atau terlibat dalam pakta pertahanan, karena bukan merupakan keinginan Indonesia untuk terlibat dalam bentuk kerjasama tersebut. Pada saat ini beberapa negara-negara anggota ASEAN sudah memiliki aliansi ataupun hubungan militer yang kuat dengan negara super power, tetapi Indonesia tetap tidak berkeinginan untuk mengikuti langkah-langkah tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip negara. Jika ingin berubah maka perlu ada perubahan mendasar hingga mencapai pada prinsip politik luar negeri Indonesia.

Kemungkinan kedepan juga sangat kecil, Indonesia merupakan salah satu pendiri Gerakan Non Blok. Indonesia menganggap bahwa bentuk kerjasama pakta pertahanan itu merugikan, karena ketika ada suatu kekuatan negara besar memasuki wilayah Indonesia, ada kemungkinan wilayah-wilayah penting di Indonesia akan dikuasai oleh kekuatan itu.

Berbagai pengembangan bentuk kerjasama di masa depan mungkin saja terjadi. Mengenai kerjasama Malphindo, Okta menyatakan mungkin saja ada pengembangan karena kerjasama tersebut sifatnya bertingkat dan berlanjut, jika awalnya berbentuk patroli perbatasan terkoordinasi, ada kemungkinan akan dilakukan di '*hot pursue*', pengembangan tersebut merupakan cikal bakal dari upaya membangun kepercayaan (Heru Okta, Komunikasi Personal, 23 Oktober 2017).

Tetapi menurunnya bentuk kerjasama patroli melintas batas di daratan untuk mengantisipasi terorisme tidak akan bisa dilakukan, hal tersebut memiliki konsekuensi yang tinggi. Indonesia perlu memperhatikan keadaan yang

sedang terjadi apalagi keadaan yang terjadi masih sangat kacau seperti di Marawi pada saat penetapan kondisi pertempuran selama beberapa bulan. Kerjasama yang memungkinkan adalah adanya *comand control* dan pelatihan. Tetapi tidak boleh jika TNI menetap di Filipina. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bentuk kerjasama menurut Okta yaitu Indonesia bisa melakukan kunjungan ke Filipina kapanpun, Indonesia sudah memiliki *lialison office* di beberapa tempat disana, oleh karena itu kunjungan dan pertukaran harus sering dilakukan. Hal tersebut juga akan mempermudah kepentingan militer dari kedua negara (Heru Okta, Komunikasi Personal, 23 Oktober 2017).

Kerjasama dalam operasi militer di daratan mungkin saja terjadi, saat ini sudah terjadi patroli di maritim dan di udara. Ada kemungkinan untuk operasi tempur atau operasi teritorial, tetapi hal tersebut belum diwujudkan, tetapi ada kemungkinan untuk terwujud. Hal tersebut memerlukan adanya pembahasan dalam tingkat kebijakan, dan juga persetujuan tingkat legislatif (Heru Okta, Komunikasi Personal, 23 Oktober 2017).

Yanyan menjelaskan ada beberapa pertimbangan yang perlu dipikirkan dalam pengiriman pasukan ke wilayah negara lain, seperti apakah Filipina rela jika TNI sampai melakukan penembakan dan membunuh warga mereka. Oleh karena itu kerjasama pertahanan seperti itu masih terlalu jauh untuk dibahas. Hal yang memungkinkan adalah kerjasama militer dibidang keamanan. Bentuk kerjasama penempatan pasukan juga sangat susah diciptakan, kecuali berada dibawah pasukan PBB. Hal tersebut menurutnya hanya akan mungkin ketika ASEAN sudah berbentuk seperti Uni Eropa yaitu tunggal dan terintegrasi, sudah memiliki pasukan regional. Hal tersebut juga masih sangat jauh untuk terbentuk karena nanti regional yang akan mengurus masalah logistik militernya, kewenangannya, pemberian mandat, penempatan, dan pendanaan (Yanyan Mochamad, Komunikasi Personal, 10 November 2017).

Salah satu bentuk yang paling memungkinkan untuk pengembangan bentuk kerjasama antara Indoensia dengan Filipina di masa mendatang adalah

terbentuk adalah adanya ASEAN Peacekeeper, karena sudah terbentuk forum ASEAN Peacekeeping Network, menurut Yanyan, di masa depan sangat besar kemungkinan akan ada ASEAN Peace Keeping Force, hal tersebut juga jika dilihat dari bentuk ASEAN *political security community*.

Pembangunan ASEAN Peacekeeping force mungkin memerlukan waktu yang panjang sampai terjadi realisasinya, meskipun pada saat ini telah terbentuk forum ASEAN Peacekeeping Centers Network Meeting yang arahnya untuk membentuk suatu ASEAN Peacekeeping Center Network (APCN) atau pusat jaringan pasukan penjaga perdamaian ASEAN. APCN dimaksud untuk menghubungkan pusat-pusat penjagaan perdamaian yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Wacana tersebut sebenarnya telah dimunculkan oleh Indonesia dengan dukungan Filipina pada tahun 2002, tetapi belum dapat terbentuk pada waktu itu karena masih mendapatkan penolakan sampai dapat terbentuk pada tahun 2011.

ASEAN dalam *blue print* ASEAN Political and security Community (APSC) juga menyatakan bahwa perlunya untuk mendirikan sebuah APCN, selain itu NADI atau Network of ASEAN Defense and Security Institution, pada 2010 juga mengusulkan untuk mempertimbangkan untuk mendirikan organisasi peacekeeping gabungan dalam ASEAN (Parameswaran, 2015).

Alasan untuk mendirikan pasukan penjaga perdamaian ASEAN saat ini ideal untuk menghadapi berbagai konflik internal yang terjadi di beberapa negara ASEAN, dan beberapa anggota ASEAN juga telah terlibat sebagai pengamat dalam inisiatif *peacebuilding* di *hotspot* seperti Aceh dan Mindanao, Timur Timor ataupun di tempat lain bersama PBB (Parameswaran, 2015b).

Hal yang penting dalam suatu kerjasama menurut Dumadi adalah adanya kesepakatan antara negara-negara yang terlibat, terutama ketika suatu negara akan menyambut masuk negara lain kedalam wilayah negaranya. Saat ini antara Indonesia dengan Filipina sudah tercipta kerjasama trilateral, dalam kesepakatan tersebut telah ditentukan adanya patroli di

perbatasan negara masing-masing dan tidak melintas melewati batas negaranya. Meskipun begitu kemungkinan-kemungkinan akan tetap ada, apakah akan melintasi batas negara atau tidak, hal tersebut tergantung pada kesepakatan (Hastin Dumadi, Komunikasi Personal, 2 November 2017)

Mengenai kemungkinan untuk Indonesia terlibat pada bentuk kerjasama penempatan di Filipina dalam penanggulangan terorisme, Dumadi menjelaskan bahwa ada kemungkinan untuk kerjasama seperti itu, Filipina membutuhkan dukungan patroli yang lebih kuat. Jika memang akan dilakukan pembentukan maka standar operasi dan prosedurnya harus dibicarakan. Indonesia juga harus mempertimbangkan berbagai macam hal seperti biaya yang besar, padahal kondisi yang saat ini terjadi Indonesia masih kesusahan untuk melakukan patroli di wilayahnya sendiri (Hastin Dumadi, Komunikasi Personal, 2 November 2017).

Atas berbagai pertimbangan tersebut, Dumadi menjelaskan bahwa patroli memang perlu dilakukan tapi tetap pada wilayahnya masing-masing secara terkoordinasi tanpa perlu melewati batas negara. Sampai saat ini tidak perlu melakukan joint patrol tetapi cukup dengan dilakukan patroli terkoordinasi pada wilayah masing-masing, saat ini selain diadakan patroli maritim juga dilakukan patroli dari udara dengan pesawat militer masing-masing negara (Hastin Dumadi, Komunikasi Personal, 2 November 2017).

Selain patroli di wilayah perairan dan udara, patroli wilayah darat adalah salah satu kemungkinan yang akan terjadi berikutnya. Meskipun begitu menurut HASTIN, akan memiliki konsekuensi dan hal tersebut juga membutuhkan perjanjian, tetapi untuk saat ini belum ada kecenderungan untuk sampai pada bentuk kerjasama tersebut, Indonesia tetap menghormati wilayah negara Filipina.

Indonesia sendiri pernah melakukan bentuk kerjasama yang membutuhkan keterlibatan langsung pada wilayah darat negara lain, hal itu terjadi pada bantuan kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Pada kasus tersebut

ketika Indonesia merasa perlu untuk membantu dalam konflik Rakhine, Indonesia menempuh proses yang panjang untuk membuat pemerintah Myanmar mengizinkan perwakilan Indonesia melintas ke wilayah negaranya. Dalam proses tersebut juga dijelaskan bahwa Indonesia akan memberitahu detail perjalanan, rute, jumlah rombongan, apa saja yang dibawa, dan sebagainya (Hastin Dumadi, Komunikasi Personal, 2 November 2017).

Masalah tentang kedaulatan negara dan kekhawatiran akan tindakan intervensi diantara kedua negara umumnya ditangani dengan adanya kesepakatan internasional, dalam hal penjagaan keamanan khususnya, kedua negara saat ini telah melakukan tindakan patroli bersama, dalam perkembangannya patroli udara bersama telah mengundang anggota gabungan negara lain dalam operasinya di suatu negara dengan negara tuan rumah sebagai penyedia sekaligus pemimpin operasi. Pelibatan unsur negara lain tersebut menjadi suatu pemecah permasalahan kecemasan terhadap pelanggaran wilayah negara.

Blueprint dari APSC menjelaskan perlunya pembangunan lebih lanjut bagi upaya-upaya pencegahan konflik dan upaya *confidence-building measures*, melalui AseAN regional Forum (ARF) dan ASEAN Defense Minister Meeting Plus Eight (ADMM+8), kedua forum regional tersebut melibatkan seluruh anggota ASEAN termasuk juga Jepang. Cetak Biru APSC yakin ASEAN mampu membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih kuat dan lebih komprehensif dibandingkan model yang telah ada.